

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK) DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
MUHAMMAD DARU KUTNI
201103020015
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKUTAS DAKWAH
DESEMBER 2024**

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK) DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

Muhammad Daru Kutni
NIM : 201103020015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Nasobi Niki Suma, S.Pd., M.Sc.
NIP. 198907202019031003

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK) DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang



Achmad Faesol, M.Si.
NIP. 198402102019031004

Sekretaris



Muhammad Farhan, M.I.Kom.
NUP. 201908186

Anggota :

1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
2. Nasobi Niki Suma, S.Pd., M.Sc.



Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



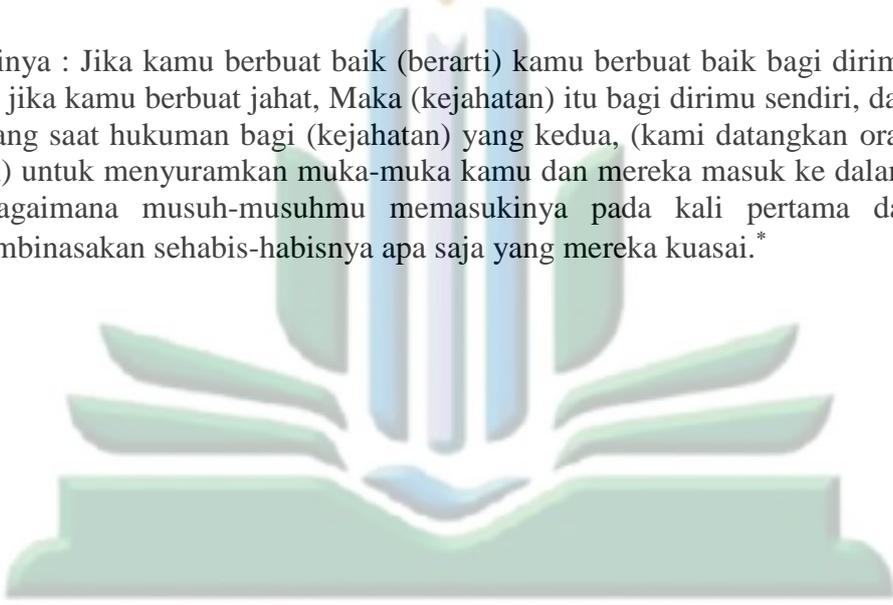
Dr. Fawnizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ^ط وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ج فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأ^ط
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا



Artinya : Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al Qur'an Surat Al-Isra ayat 7, Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 340.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana yang mungkin jauh dari kata sempurna, tetapi sangat berarti bagi saya. Saya dedikasikan karya ini kepada mereka yang selalu ada dalam doa-doa saya dan yang terus memberi semangat, dukungan, serta motivasi agar karya ini dapat terselesaikan.

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Abd. Samad dan Ibu Ernawati yang selalu memberikan doa serta dukungan di setiap urusan dan langkah putranya, sehingga putranya bisa melakukan hal yang luar biasa diatas batas kemampuannya sebagai manusia biasa. Serta yang selalu memberikan kasih sayang dalam bentuk dan cara terbaiknya.
2. Kakak Annisa Firdausiyah dan Sitti Tuffahatur Rohmaniyah beserta semua keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi dan nasihatnya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa dan berharga.
4. Seluruh teman seperjuangan PMI dan UKOR UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan kontribusi dan informasi kepada saya pada penulisan ini.
5. Untuk calon pendamping hidup saya, Najwah Fahira yang selalu ada membantu, memberikan arahan dan semangat sehingga mencapai tahap ini.
6. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam tempat saya menempuh pendidikan dan mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Swt. atas berkat rahmat, taufik dan limpahan hidayah-Nya yang telah memberikan akal sehat dan kemampuan dalam melakukan aktifitas sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dengan ajaran Islam yang sempurna, menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini berjudul **“Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo”** merupakan hasil usaha saya dalam menyelesaikan program studi Strata 1 (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Achmad Faesol, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan membimbing saya dari awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Nasobi Niki Suma, S.Pd., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan membimbing saya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah khususnya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, TKSK, Pihak Kecamatan serta Masyarakat yang telah bersedia membantu melancarkan jalan penelitian.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dengan usaha yang maksimal. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga semua bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 November 2024
Penulis

Muhammad Daru Kutni
NIM. 201103020015

ABSTRAK

Muhammad Daru Kutni, 2024: Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Fakir Miskin, dan Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju pada kemajuan, terutama dalam aspek ekonomi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo pada tahun 2023, tercatat bahwa PMKS Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas menempatkan posisi 2 urutan teratas jumlah PMKS yang paling banyak ditangani yakni sekitar 4.039 orang untuk fakir miskin dan 1.971 orang untuk penyandang disabilitas dari total jumlah 7.939 orang. Oleh karena itu, perlu adanya salah satu unsur atau pelaku dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni TKSK. Lewat TKSK inilah PMKS dapat diberdayakan dalam upaya mencapai keadilan sosial

Fokus penelitian: 1. Bagaimana efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS tergolong efektif karena telah melalui beberapa indikator yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program, Kemudian peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo berupa peran administrasi, fasilitasi, dan koordinasi. Peran administrasi berupa pemetaan sosial, melakukan pencatatan, serta melakukan pelaporan untuk memantau hasil kegiatan. Peran fasilitasi berupa pendampingan sosial, melakukan bimbingan sosial, melakukan kemitraan, serta melakukan rujukan untuk menghubungkan PMKS dengan layanan yang lebih sesuai. Peran koordinasi berupa saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, serta membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian terdapat faktor pendukung berupa struktur organisasi yang jelas, dan kemampuan dari TKSK itu sendiri untuk melakukan pelayanan serta penanganan terhadap PMKS. Selain itu, ada faktor penghambat yang menjadikan pendampingan kurang maksimal yaitu kurangnya tenaga TKSK yang hanya 1 orang disetiap kecamatan, serta sarana transportasi untuk dapat mengakses ke daerah terpencil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49

B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahapan Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	117
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Subyek penelitian.....	52
Tabel 4.1 Daftar nama TKSK	65
Tabel 4.2 Data PMKS Kabupaten Situbondo	71
Tabel 4.3 Daftar 5 PMKS fakir miskin tertinggi	72
Tabel 4.4 Daftar 5 PMKS penyandang disabilitas tertinggi	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian.....	51
Gambar 4.1 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.....	62
Gambar 4.2 Logo TKSK.....	63
Gambar 4.3 Kegiatan sosialisasi dan evaluasi pendataan PMKS	76
Gambar 4.4 Koordinasi dan konsultasi untuk penyandang disabilitas	86
Gambar 4.5 Pendampingan pembagian bantuan sosial.....	90
Gambar 4.6 Pendampingan penyaluran bantuan.....	91
Gambar 4.7 Pengiriman peserta pelatihan keterampilan.....	95
Gambar 4.8 Pelatihan bagi penyandang disabilitas	96
Gambar 4.9 Kegiatan pengembangan potensi pada PMKS	97
Gambar 4.10 Kerjasama dengan Sentra Mahatmiya.....	100
Gambar 4.11 Rujukan bersama puskesmas.....	102
Gambar 4.12 Pendataan PMKS.....	108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju pada kemajuan, terutama dalam aspek ekonomi.¹ Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kompleksitas masalah kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti fakir miskin dan penyandang disabilitas. Setiap individu memiliki hak untuk hidup bermartabat dan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, pada kenyataannya, banyak orang dari mereka yang masih mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan.

Penting dilakukannya penelitian ini karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang sehingga dapat menghindari potensi adanya kesenjangan sosial dan mengurangi potensi konflik sosial agar stabilitas sosial di Kabupaten Situbondo tetap terjaga. Jika penelitian ini tidak dilakukan, Kabupaten Situbondo berisiko mengalami degradasi sosial, lemahnya pengelolaan masalah kesejahteraan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi langkah penting untuk mencegah masalah sosial yang lebih besar dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Fakir miskin dan penyandang

¹ Achmad Saeful, dan Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam", SYAR'IE, Vol. 3, (Februari 2020): Hal 4, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

disabilitas dua kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.² Pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang bukan sepenuhnya miliknya, ada hak fakir miskin yang harus diberikan. Hal ini terkandung dalam QS. Adz-Dzariyat: 19 dalam firman Allah SWT yang berbunyi:³

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Sedangkan penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Islam mengajarkan nilai-nilai sosial yang harmonis dan penuh kemuliaan, dimana menekankan kepada keadilan, kasih sayang kepada orang yang memiliki keterbatasan, menjaga silaturahmi, menghormati hak orang lain, keabadian dalam tradisi, dan pentingnya menyebarkan kedamaian melalui salam. Seperti firman Allah SWT dalam Al surat An-Nur : 16 yang berbunyi:⁴

² Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (Jakarta, 2010).

³ Al Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19, Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 684.

⁴ Al Qur'an Surat An-Nur ayat 16, Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 483.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo pada tahun 2023, tercatat bahwa PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas menempatkan posisi 2 urutan teratas jumlah PMKS yang paling banyak ditangani yakni sekitar 4.039 orang untuk fakir miskin, dengan rincian Kecamatan Banyuputih tertinggi dengan angka 672 orang, Kecamatan Panarukan ditengah dengan 222 orang, dan Kecamatan Kendit terendah dengan 12 orang. Sedangkan untuk penyandang disabilitas berjumlah 1.971 orang, dengan rincian Kecamatan Asembagus tertinggi dengan angka 230 orang, Kecamatan Kapongan ditengah dengan 126 orang, dan Kecamatan Arjasa terendah dengan 0 orang dari total jumlah seluruh PMKS 7.939 orang.⁵

⁵ Pemerintah Kab. Situbondo, PENDATAAN PMKS 2023 Dinas Sosial (Situbondo, 2023).

Oleh karena itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi kedua kelompok ini menjadi sangat penting dalam upaya mencapai keadilan sosial dan inklusi. Tentunya fenomena tersebut perlu adanya penanganan dari berbagai pihak karena dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan kelompok secara luas. Permasalahan ini mencakup rentang yang luas, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga masalah kesehatan mental.

Menurut Ibu Fifi selaku dari pihak dinas sosial mengungkapkan bahwa:

“Dari data tersebut itu sudah mencakup dari 26 jenis PMKS itu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui apa yang telah dilakukan TKSK kemarin, melalui program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial”.

Ada sejumlah faktor yang mendorong peneliti untuk menyelidiki tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pertama yaitu, kepedulian moral dan keinginan untuk memperbaiki kondisi sosial menjadi motivasi utama bagi peneliti untuk meneliti masalah ini. Hal ini untuk mencari solusi yang efektif untuk membantu individu yang menghadapi kesulitan dalam mencapai kesejahteraan mereka. Masalah kesejahteraan sosial yang tidak diatasi dengan baik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Kompleksitas dan keragaman masalah kesejahteraan sosial juga menjadi daya tarik untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan individu, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, psikologis, serta hubungan antara faktor-faktor tersebut.

Harapan akan kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif seringkali tidak sejalan dengan kenyataan yang menunjukkan adanya ketimpangan yang mendalam dalam akses terhadap sumber daya dan layanan. Meskipun ada harapan untuk kemajuan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, kenyataannya masih terdapat banyak individu dan kelompok yang terpinggirkan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan akses terhadap layanan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini. Salah satu aspek yang menyoroti kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah kurangnya efektivitas dari program-program kesejahteraan yang ada. Meskipun ada berbagai program yang dirancang untuk membantu individu yang membutuhkan, namun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya pendanaan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya sosial masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial lainnya, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial perseorangan adalah mereka yang memiliki kompetensi, kemauan dan kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial, dan memiliki kriteria

kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, serta komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu unsur atau pelaku peran masyarakat perseorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK merupakan seseorang yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan yang mana merupakan tugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.⁶ Hal ini menjadi elemen kunci dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial di tingkat lokal, terutama di tingkat kecamatan. Sebagai perwakilan dari pemerintah setempat, TKSK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial terselenggara dengan baik dan efisien. Dalam kerangka kerja pembangunan sosial, keberadaan TKSK menjadi penting dalam menjangkau masyarakat di tingkat dasar dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Farhana selaku pihak dari kecamatan, menurutnya:

“TKSK itu merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Jadi, peran mereka sangat strategis dalam mendekati program-program sosial kepada masyarakat, dan memastikan bantuan tepat sasaran, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga yang membutuhkan”.

⁶ Permensos RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Jakarta, 2018).

Peran TKSK tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak, advokasi dan pengawalan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat rentan, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga dan stakeholder di tingkat kecamatan serta fasilitator partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan program-program kesejahteraan sosial yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo.

Dengan melihat angka yang tinggi, sehingga tertarik untuk mengetahui bagaimana peran TKSK dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Peranan yang diharapkan dalam suatu penelitian adalah memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat secara akademis. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang sosial, khususnya terkait peran lembaga sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, dengan harapan dapat menambah pengetahuan, terutama dalam ranah sosial. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini :

- a. Manfaat untuk Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman pribadi peneliti, serta meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas penulisan karya

tulis ilmiah, mampu membuka wawasan penulis dalam melihat fenomena atau masalah kesejahteraan sosial.

- b. Manfaat untuk Lembaga : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif sebagai tambahan referensi untuk literasi mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam serta mengenalkan program dan peran lembaga sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
- c. Manfaat untuk Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pembaca dan menjadi sumber evaluasi bagi peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran lembaga sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Peran adalah tindakan atau tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan, seperti jabatan untuk melaksanakan tugas dari suatu kewajiban dan hak yang harus dijalani untuk melayani masyarakat. Peran dalam penelitian ini adalah perilaku dari dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang membantu memberikan fasilitasi terhadap masyarakat fakir miskin dan penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan dari TKSK. Peran tersebut berupa peran koordinasi, peran fasilitasi, dan peran administrasi.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan yang mana merupakan tugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dalam Penelitian ini peneliti membatasi 5 Kecamatan dengan jumlah kasus PMKS fakir miskin tertinggi dan 5 Kecamatan dengan jumlah kasus PMKS penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Situbondo. Diantaranya adalah TKSK Banyuputih, TKSK Sumber Malang, TKSK Arjasa, TKSK Mlandingan dan TKSK Suboh (PMKS Fakir Miskin). TKSK Asembagus, TKSK Mangaran, TKSK Banyuglugur, TKSK Besuki, TKSK Suboh (PMKS Penyandang Disabilitas).

3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang, keluarga, atau masyarakat baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya yang disebabkan karena adanya hambatan atau kesulitan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus pada PMKS fakir miskin dan PMKS penyandang disabilitas, sesuai dengan jumlah kasus tertinggi yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika membahas penulisan skripsi mulai dari Bab I sampai penutup Bab V. Pembahasan ini bersisi tentang:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang atau permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi, dari permasalahan yang ada munculah rumusan masalah, setelah itu tujuan permasalahan yang akan diteliti, manfaat permasalahan yang akan diteliti, penjelasan singkat mengenai judul penelitian kemudian sistematika pembahasan atau isi pembahasan yang berada dalam sub bab.

Bab II kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang informasi dari penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai rujukan dari penulisan skripsi dan harus memiliki keterbaruan dalam penelitian, kemudian kajian teori berisi tentang teori yang akan dikaitkan dengan analisis data di lapangan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang langkah ilmiah dalam mendapatkan data penelitian di lapangan, yang berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian atau lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data atau metode yang dipakai dalam mengambil data, analisis data atau meringkas data yang telah ditemukan, keabsahan data dengan mengedit data yang telah dikumpulkan dan yang terakhir tahapan pada penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian terdiri dari isi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, penyajian data dan analisis data membahas temuan penelitian dengan rinci dan kalimat perkataan dalam hasil wawancaranya, kemudian pembahasan temuan.

Bab V Penutup

Penutup membahas tentang ringkasan dari hasil kegiatan penelitian di lapangan dan berisi tentang saran penulis kepada objek penelitian, subyek penelitian dan penulis selanjunya yang akan meneliti pembahasan yang sama



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian oleh peneliti, ada sebuah langkah awal untuk mengetahui lebih dalam tentang judul penelitian ini, adapun langkah awal dalam penelitian perlu sekiranya terlebih dahulu mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya atau telah dikaji atau diteliti oleh peneliti terdahulu sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Ada pun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian dari Laela Safitri pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dan faktor apa saja dalam dalam pendampingan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar berupa peran fasilitator, peran edukatif, peran representatif, dan beberapa peran teknis. Faktor pendukung berupa struktur organisai yang jelas, dan

⁷ Laela Safitri “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”, 2023.

kemampuan dari pekerja sosial itu sendiri dalam melaksanakan pendampingan. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya sumber daya manusia khususnya pekerja sosial anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

2. Penelitian dari Surya Alivia Rizki pada tahun 2024 yang berjudul “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapun peran LKSA Siti Fatimah dan faktor apa saja dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran LKSA Siti Fatimah dalam memberdayakan anak melalui pelayanan kesejahteraan berupa peran fasilitator, peran motivator, peran mediator, dan peran dinamisator. Faktor pendukung berupa sarana dan prasarana, dukungan masyarakat lingkungan sekitar, donatur, dan motivasi pemimpin. Sedangkan faktor penghambat berupa kepribadian pada anak, rendahnya kesadaran masyarakat, dan faktor dana yang tidak optimal.

3. Penelitian dari Vivi Lestari pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir

⁸ Surya Alivia Rizki “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”, 2024.

Miskin Di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditujukan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini yakni pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada PPKS fakir miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

4. Penelitian dari Eko Yudianto Yunus pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

⁹ Vivi Lestari “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda” 2021.

¹⁰ Eko Yudianto Yunus “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” 2021.

(PMKS) dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada semua PPKS yang ada di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sedangkan dipenelitian ini berfokus hanya pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

5. Penelitian dari Yefni pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani masalah sosial. Objek penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) ataupun masalah sosial yang ada dan terjadi pada masa pandemic Covid – 19 berlangsung. Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini yakni

¹¹ Yefni “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid- 19” 2021.

pada fokus utama yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada masa pandemi covid 19 sedangkan dipenelitian ini berfokus pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo di masa yang normal.

6. Penelitian dari Nurul Hidayah pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Membantu Penanganan Penyandang Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang..

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan penanganan penyandang disabilitas fisik. Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus utama PMKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada PMKS jenis penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Sedangkan dipenelitian ini berfokus pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

7. Penelitian dari Ayu Khairur Rizqiyah, H.S. Nugroho pada tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

¹² Nurul Hidayah “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Membantu Penanganan Penyandang Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang” 2023.

dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pelaksanaan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada semua PPKS yang ada di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantu sedangkan dipenelitian ini berfokus hanya pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

8. Penelitian dari Silvi Octavia S pada tahun 2022 yang berjudul “Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk fasilitasi yang dilakukan TKSK pada PPKS

¹³ Ayu Khairur Rizqiyah, H.S. Nugroho “Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon” 2022.

¹⁴ Silvi Octavia S “Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta” 2022.

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada semua PPKS yang ada di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Sedangkan dipenelitian ini berfokus hanya pada PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.1 :
Tabel persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu

No	Identitas dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Laela Safitri (2023) Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran pekerja sosial dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terletak pada fokus, objek, dan lokasi penelitian
2	Surya Alivia Rizki (2024) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan terletak pada fokus, objek, dan lokasi penelitian
3	Vivi Lestari (2021) Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dan fokus pada fakir miskin serta	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian

	Loa Janan Ilir Kota Samarinda	menggunakan penelitian kualitatif	
4	Eko Yudianto Yunus (2021) Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dalam mendampingi PMKS dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian
5	Yefni, Y Rahmat Akbar, Putri Rahayu (2021) Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Pada Masa Pandemi Covid- 19	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terletak pada masa dan lokasi penelitian
6	Nurul Hidayah (2023) Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Membantu Penanganan Penyandang Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dan disabilitas	Perbedaan terletak pada fokus, objek, dan lokasi penelitian
7	Ayu Khairur Rizqiyah, H.S. Nugroho (2024) Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan terletak pada, objek dan lokasi penelitian
8	Silvi Octavia S (2022), Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	Persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang peran TKSK dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan terletak pada fokus, objek, dan lokasi penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini menggabungkan elemen baru, karena penelitian sebelumnya membahas topik ini hanya dalam peran TKSK dalam 1 jenis PMKS dan 1 kecamatan dalam penanganan PMKS. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait peran TKSK dalam penanganan PMKS di 2 jenis serta 10 kecamatan tertinggi kasus PMKS. Bentuk peran yang diberikan kepada PMKS tersebut berupa peran administrasi yang mengurus administrasi berupa pemetaan sosial sesuai dengan daerah yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, melakukan pencatatan berupa data dan informasi PMKS, serta melakukan pelaporan yang telah dilaksanakan untuk memantau hasil kegiatan. Peran TKSK sebagai koordinator dimana TKSK melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi lain untuk membantu TKSK dalam penanganan PMKS sesuai dengan masalah yang dihadapi berupa saling memberikan informasi, menyamakan persepsi untuk membangun kesepahaman yang sama tentang masalah dan penanganan yang sesuai serta membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Peran TKSK sebagai fasilitator dimana TKSK memberikan fasilitas sesuai dengan masalah yang dihadapi PMKS berupa pendampingan sosial untuk membantu PMKS dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan, melakukan bimbingan sosial untuk mengembangkan kemampuan PMKS, melakukan kemitraan untuk

memperluas jangkauan layanan, serta melakukan rujukan untuk menghubungkan PMKS dengan layanan yang lebih sesuai.

B. Kajian Teori

Teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, membangun kerangka pikir, dan mengembangkan pedoman penelitian dibahas dalam bagian ini. Teori yang digunakan harus sesuai dengan fokus masalah. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa sumber rujukan yang digunakan adalah yang paling baru dan relevan, yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, atau temuan penelitian terdahulu.¹⁵

1. Peran Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁶ Artinya sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Secara terminology peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷ Apabila

¹⁵ Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 43

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁷ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁸

Dalam *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn dalam buku Sosiologi Sebagai Pengantar, teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Seseorang dianggap telah melakukan peran jika seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya.¹⁹ Peran juga dikatakan sebagai perilaku yang bersifat menyeluruh dalam pemangku sosial, yang memungkinkan untuk mendapatkan status individu pada masyarakat.²⁰

Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, yang berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

¹⁸ Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

¹⁹ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep Konsep Dasar, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm 37-38

²⁰ Nasobi Niki Suma dan Khoirotun Saniyah." Peran Gapoktan dalam Memberdayakan Eksistensi Petani Kopi Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember." Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol 8 No 2. Hlm 265 (Desember 2023)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauh mana peran dari TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo. Untuk melihat peran dari TKSK berdasarkan teori peran tersebut ialah, kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

b. Jenis-jenis peran

Jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²¹

- 1) Peran Aktif atau disebut juga dengan aktivitas kelompok adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok.
- 3) Peran Pasif adalah kontribusi pasif anggota kelompok, dimana mereka menahan diri dari memberikan kemungkinan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

²¹ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 242

Dari berbagai jenis peran tersebut, peneliti menggunakan jenis peran aktif karena peran tersebut diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok. Peran yang dimaksud adalah peran dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

c. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.²² Konsep pemberdayaan ini memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Sedangkan menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²³ Adapula menurut teori Actors yang dikemukakan oleh Cook dan Macaulay bahwa masyarakat dianggap sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan jika mereka diberi kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka, tanpa terikat oleh kendali yang ketat. Teori ini menghasilkan perubahan yang

²² Jim Ife, "Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice" (1997).

²³ Zubaedi, Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007),42

terencana karena semua input telah dipersiapkan sejak awal. Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam kerangka teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat yang didukung oleh faktor internal dan eksternal. Sementara itu, aktor yang berperan dalam pemberdayaan ini adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.²⁴

Secara umum pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk membentuk masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar dapat secara mandiri mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan memiliki kendali atas semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan mereka.²⁵ Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu.

Menurut Najiyati terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni:²⁶

1) Prinsip Kesetaraan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar yang sesuai dengan kebebasan yang diterima orang lain, artinya

²⁴ Sarah Cook dan Steve Macaulay, "Perfect Empowerment" (1996)

²⁵ Afriansyah, "Pemberdayaan Masyarakat" (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), Hal 2

²⁶ Aksal Mursalat, "Pemberdayaan Masyarakat" (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), Hal 75.

semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan baik pria maupun wanita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Setara berarti sejajar atau sederajat. Dinamika yang dibangun adalah mengembangkan dan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta keahlian masing-masing yang kemudian digunakan secara bersama. Masing-masing pihak saling menghargai dan belajar bersama.

2) Prinsip Partisipatif

Suatu dorongan mental dan emosional dari seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan mereka secara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

3) Prinsip Swadaya

Prinsip menghargai serta mendahulukan kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan dari pihak eksternal, artinya kekuatan sendiri yang mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumber daya lokal dalam melaksanakan pembangunan serta mampu bekerja secara mandiri dalam mengatasi masalahnya, karena masyarakat mempunyai kemauan, tenaga kerja dan budaya yang sudah lama dipatuhi.

4) Prinsip Berkelanjutan

Tindakan-tindakan yang secara bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembangunan

berkelanjutan dalam lingkungan masyarakat, artinya kegiatan pemberdayaan didesain untuk terus berjalan, meskipun awalnya kedudukan atau peran pendamping lebih berpengaruh dibanding masyarakat. Akan tetapi secara perlahan, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah bisa mengelola kegiatannya sendiri.

Menurut Mardikanto terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:²⁷

1) Perbaikan Kelembagaan “*Better Insitution*”

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

2) Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Disamping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan

²⁷ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, Pemberdayaan Masyarakat (Sleman, CV Budi Utama, 2019), 8.

yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh lembaga masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3) Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik. Maka manusia tidak akan merusak lingkungan. Pendapatan masyarakat harus memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan

keluarganya. Jadi, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.

5) Perbaikan Kehidupan “Better Living”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan adanya lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan Masyarakat “Better Community”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil.²⁸ Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.²⁹ Dalam memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Maginso yang dikutip oleh Mulyasa mengatakan bahwa “*efektivenes means different to different people*”.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan.³¹ Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang

²⁸ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: BumiAksara, 2005), 129.

²⁹ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE,1998), 7.

³⁰ Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002),82.

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 64.

telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.³² Lipham dan Hoeh meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Sejalan dengan itu Steer mengungkapkan bahwa efektivitas adalah bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasarannya.³³

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut, efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya input, proses dan output yang di sertai produktifitas. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.³⁴

b. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program.

³² Mulyasa, manajemen berbasis sekolah., (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 82.

³³ Mulyasa, manajemen berbasis sekolah., (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 83

³⁴ Mulyasa, manajemen berbasis sekolah., (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 83.

Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Kebermanfaatan dan kepuasan pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.³⁵

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:³⁶

1) Ketetapan sasaran

Sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

3) Tujuan program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

³⁵ Agus Tulus, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009), Hal 18.

³⁶ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar" (Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT Volume 2 tahun 2007), 34.

4) Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

a. Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.³⁷ Secara umum peran pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut.³⁸

- 1) Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- 2) Menghubungkan orang dengan dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber pelayanan dan kesempatan.
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

³⁸ Wisnu Andrianto, M. Saleh Soeaidy, Stefanus Pani Rengu, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)", Tahun 2014, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal 205.

- 4) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi :³⁹

1) Pencegahan Disfungsi Sosial

Intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pencegahan disfungsi sosial dilakukan dalam bentuk penyuluhan sosial, bimbingan sosial, pendampingan sosial, peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, pelayanan aksesibilitas, advokasi sosial, pencegahan disfungsi sosial bentuk lain.

2) Perlindungan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, advokasi sosial, pemberian akses bantuan hukum.

3) Rehabilitasi Sosial

Intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif. Rehabilitasi sosial terdiri dari :

a) Rehabilitasi sosial dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rehabilitasi Sosial dasar dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, serta rujukan.

b) Rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rehabilitasi sosial lanjut dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, serta rujukan. Rehabilitasi sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dukungan aksesibilitas, bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

4) Pemberdayaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri, serta meningkatkan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan, penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan dalam masyarakat, pendampingan, kemitraan dan penggalangan dana, pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta bimbingan lanjut.

5) Pengembangan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pengembangan sosial dilakukan dalam bentuk pemetaan sosial, advokasi sosial, pendidikan psikoedukasi, kampanye sosial, pengembangan kemitraan, peningkatan

aksesibilitas, supervisi sosial, penguatan integrasi sosial, pengembangan inovasi pekerjaan sosial, serta pengembangan sosial bentuk lain.

b. Pengertian TKSK

Seseorang yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan yang mana merupakan tugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.⁴⁰

c. Tujuan TKSK

Dalam melaksanakan peranannya TKSK memiliki tujuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini telah diatur dalam Permensos RI nomor 28 Tahun 2018 pada pasal 2 diantaranya adalah:⁴¹

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan lainnya di wilayah kecamatan.
- 3) Meningkatkan sinergitas serta kerjasama antar program PMKS dengan program pembangunan lainnya di wilayah kecamatan.

d. Tugas TKSK

Sesuai dengan Permensos RI nomor 28 Tahun 2018 pasal 4 tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial:⁴²

⁴⁰ Permensos RI nomor 28 Tahun 2018, Pasal 1, (Hal 3)

⁴¹ Permensos RI nomor 28 Tahun 2018 pasal 2 (Hal 4)

⁴² Permensos RI nomor 28 Tahun 2018 pasal 4 (hal 5)

- 1) Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- 2) Tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tanpa imbalan. Maksudnya membantu tanpa mengharapkan imbalan dalam menyelesaikan masalah sosial.
- 3) Tugas TKSK dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- 4) Berkoordinasi dengan kecamatan terlebih dahulu dalam melakukan tugasnya.
- 5) Bekerja sama dan menyinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya.

e. Peran TKSK

Berdasarkan Permensos RI nomor 28 Tahun 2018 pasal 5,6,7, dan pasal 8 :⁴³

- 1) Koordinasi

Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial Kabupaten, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam bentuk saling memberikan informasi, dan menyamakan persepsi, serta

⁴³ Permensos RI nomor 28 Tahun 2018, pasal 5,6,7,8, (hal 5)

membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2) Fasilitasi

Upaya membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan atau rujukan guna meningkatkan keberfungsian sosial.

3) Administrasi

Serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan, dan pelaporan dengan menasar pada individu, kelompok, maupun masyarakat PMKS.

f. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penanganan PMKS

Dalam melaksanakan sebuah pendampingan atau pelayanan kepada masyarakat, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri. Menurut Moenir yang dikutip oleh Ana Kusmana, ada beberapa faktor pendukung supaya pelayanan berjalan dengan baik, yaitu:⁴⁴

1) Faktor Kesadaran

Menunjukkan pada suatu keadaan jiwa seseorang dimana seorang pelayan publik mampu mengendalikan emosi dalam

⁴⁴ Ana Kusmana, "Pelayanan Prima Pada Kantor Pemerintahan Adalah Keniscayaan," kemenkeu, 24 Juni 2018, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makale/id/data-publikasi/berita-terbaru/2814-pelayanan-prima-pada-kantor-pemerintahan-adalah=keniscayaan.html>.

melaksanakan pelayanan, selain itu juga adanya kerelaan dalam melaksanakan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan dalam membantu klien yaitu fakir miskin dan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya.

2) Faktor Aturan

Menerapkan aturan dengan konsisten membantu menjaga tindakan yang terarah dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, kewenangan, kemampuan berkomunikasi, pemahaman tentang waktu dan disiplin kerja.

3) Faktor Organisasi

Meliputi sistem, pembagian kerja, mekanisme kerja, prosedur pelayanan, metode yang digunakan.

4) Faktor Kemampuan Dan Keterampilan

Kemampuan ini meliputi kemampuan membuat konsep yang sesuai dengan keinginan klien.

5) Faktor Sarana Pelayanan

Sarana kerja yang lengkap dan fasilitas yang memadai juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, ada juga faktor penghambat yang menyebabkan pelayanan kurang maksimal. Penyebab yang melemahkan pelayanan antara lain:⁴⁵

⁴⁵ Ana Kusmana, "Pelayanan Prima Pada Kantor Pemerintahan Adalah Keniscayaan," kemenkeu, 24 Juni 2018, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makale/id/data-publikasi/berita-terbaru/2814-pelayanan-prima-pada-kantor-pemerintahan-adalah=keniscayaan.html>.

- 1) Kurang atau tidak ada kesadaran terhadap pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya. Mereka pelayan publik bekerja dan melayani seenaknya sehingga membuat klien gelisah karena menunggu hasil kerjanya. Hal ini terjadi karena tidak ada sikap disiplin.
- 2) Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sesuai harapan.
- 3) Pengorganisasian tugas pelayan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan tumpang tindih sehingga dapat membuang waktu dan energi, terjadi simpang siur karena tidak ada batasan yang jelas atau tercecernya tugas sehingga tidak ada yang menanganai.
- 4) Upah pegawai tidak memenuhi yang dibutuhkan sehingga pegawai tidak tenang dalam bekerja.
- 5) Pegawai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya sehingga hasil pekerjaan tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.
- 6) Sarana pelayanan yang kurang memadai.

4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Pengertian PMKS

Berdasarkan Permensos RI nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang, keluarga, atau masyarakat

baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya yang disebabkan karena adanya hambatan atau kesulitan..⁴⁶

b. Jenis-jenis dan Kriteria PMKS

Berdasarkan Permensos RI nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat 26 jenis dan kriteria PMKS diantaranya :⁴⁷

1) Anak Balita Terlantar

Seorang anak berusia dibawah umur 5 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan tidak diberikannya pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi.

2) Anak Terlantar

Seorang anak berusia 6 sampai dengan 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tuanya serta kehilangan hak asuh dari orang tua.

3) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang sedang berhadapan dengan kasus hukum karena melakukan suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana.

4) Anak Jalanan

⁴⁶ Permensos RI nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3)

⁴⁷ Kemensos, penyandang masalah kesejahteraan sosial Indonesia 2022, vol 12 (PPID dan Media Center Dinsos Riau, 2011)

Anak yang bekerja di jalanan atau hidup dan tinggal di jalanan serta melakukan kegiatan sehari-harinya di jalanan.

5) Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Seseorang yang berusia 18 tahun dan mempunyai kelainan fisik atau mental sehingga mengganggu fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya.

6) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan atau selalu diperlakukan salah baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

7) Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun dalam situasi darurat, kelompok minoritas, terisolasi, tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual, diperdagangkan, korban penyalahgunaan narkoba, dll.

8) Lanjut Usia Terlantar

Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor tertentu.

9) Penyandang Disabilitas

Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

10) Tuna Susila

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, dan jasa.

11) Gelandangan

Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tetap dan mengembara di tempat umum.

12) Pengemis

Orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara serta alasan untuk mengharapkan belas kasih orang lain.

13) Pemulung

Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang bekas di pemukiman penduduk, pasar, pertokoan yang dapat didaur ulang atau dijual kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis.

14) Kelompok Minoritas

Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga rentan mengalami masalah sosial.

15) Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)

Seseorang yang telah usai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesulitan untuk melaksanakan kehidupannya secara normal dan sulit mendapatkan pekerjaan.

16) Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

Seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan, dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang normal.

17) Korban Penyalahgunaan NAPZA

Seseorang yang menggunakan NAPZA diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18) Korban Trafficking

Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19) Korban Tindak Kekerasan

Individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat

perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20) Pekerja Migran Bermasalah

Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21) Korban Bencana Alam

Seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

22) Korban Bencana Sosial

Seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

24) Fakir Miskin

Seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26) Komunitas Adat Terpencil

Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan pengalaman lainnya. Penelitian ini dilakukan secara holistik, menggunakan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta berfokus pada konteks alami dengan menerapkan berbagai metode ilmiah. Sementara itu, Mulyana mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memanfaatkan metode ilmiah untuk menggali fenomena tertentu dengan mendeskripsikan data dan fakta secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata berdasarkan subjek penelitian.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan, penelitian kualitatif dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memahami secara mendalam fenomena tertentu. Fenomena tersebut mencakup pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang digambarkan secara holistik dalam bentuk kata-kata sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini lebih berfokus pada penemuan makna dibandingkan dengan menghasilkan generalisasi.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai peran Tenaga Kesejahteraan Sosial

⁴⁸ Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif, 2002.

Kecamatan (TKSK) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan pengalaman lainnya. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh, menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta berfokus pada konteks alami dengan menerapkan berbagai metode ilmiah.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berupaya untuk menggambarkan berbagai fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif merupakan metode yang mampu menghasilkan temuan-temuan unik yang tidak dapat diperoleh melalui alat atau metode kuantitatif lainnya.⁵⁰

Alasan Peneliti memilih metode kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan situasi di lapangan secara lebih spesifik, mendalam, dan transparan. Pendekatan kualitatif yang bersifat elaboratif memungkinkan peneliti menggali informasi secara rinci dan menyeluruh terkait fenomena tertentu. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penelitian dengan lebih jelas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti menemukan berbagai permasalahan yang akan dijadikan bahan kajian dalam penelitian.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti melakukan riset pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

⁴⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002.

⁵⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016): 24.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021): 46.

(TKSK) di Kabupaten Situbondo, meliputi Kecamatan Banyuputih, Asembagus, Arjasa, Mangaran, Mlandingan, Suboh, Besuki, Sumbermalang, dan Banyuglugur. Lokasi dan objek penelitian ini dipilih berdasarkan:

1. Wilayah tersebut memiliki angka tertinggi kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan intensif dari TKSK.
2. Aksesibilitas kecamatan dipilih berdasarkan kemudahan aksesibilitas, baik dari segi transportasi, biaya, maupun waktu penelitian.
3. Geografis wilayah kecamatan yang dipilih berdasarkan variasi geografis wilayah, seperti kecamatan dataran tinggi, dataran rendah, wilayah perkotaan, dan pedesaan.



Gambar 3.1
Peta lokasi penelitian

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini, peneliti perlu mengorganisasi informasi tertentu yang relevan untuk subjek penelitian, dengan memastikan bahwa jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan sumber data yang digunakan. Penelitian dilakukan

secara purposive sampling, artinya sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵² Subjek penelitian dipilih karena dianggap memiliki wawasan yang mendalam, kemampuan untuk mengamati, serta kemampuan untuk memberikan data yang diperlukan, sehingga mempermudah proses penelitian bagi peneliti.

Tabel 3.1
Subyek Penelitian

Informan Kunci	Informan Pendukung
TKSK Banyuputih (Ibu Resty)	Dinas Sosial Kab. Situbondo (Ibu Fifi)
TKSK Sumbermalang (Ibu Dita)	Kecamatan (Ibu Eva)
TKSK Arjasa (Bapak Anshar)	PMKS Fakir Miskin (Ibu Norsia)
TKSK Mlandingan (Mas Fiqih)	PMKS Penyandang Disabilitas (Ibu Satina)
TKSK Suboh (Ibu Intan)	
TKSK Asembagus (Bapak Badri)	
TKSK Mangaran (Ibu Lila)	
TKSK Banyuglugur (Mas Lutfi)	
TKSK Besuki (Ibu Vivin)	

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subyek penelitian tersebut berdasarkan indikator berikut :

1. Urutan 5 kecamatan tertinggi angka fakir miskin dan 5 kecamatan tertinggi angka penyandang disabilitas sesuai data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.

2. Mengklasifikasikan dari total 10 kecamatan tersebut berdasarkan karakteristik geografis dimana terdapat daerah pesisir, pegunungan, dan dataran rendah.
3. Akseibilitas kecamatan dipilih berdasarkan kemudahan aksesibilitas, baik dari segi transportasi, biaya, maupun waktu penelitian.
4. Karakteristik sosial dan ekonomi kecamatan tersebut memiliki perbedaan signifikan dalam tingkat pendapatan, pendidikan, atau lapangan pekerjaan sehingga mampu mewakili keragaman sosial-ekonomi wilayah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Selama kegiatan penelitian di lapangan, peneliti akan mencari informasi melalui teknik pengumpulan data. Ini adalah beberapa metode yang akan digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah bentuk percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan.

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan

pengamatan melalui indera penglihatan, yang didukung oleh indera lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengamati berbagai aktivitas yang dilakukan oleh TKSK, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat.

3. Dokumentasi

Menurut Menurut Sugiyono, dokumen merujuk pada peristiwa yang telah terjadi dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi yang berupa tulisan, seperti catatan harian, peraturan, kebijakan, dan lainnya, diperoleh oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) di Kabupaten Situbondo.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual, secara sistematis. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemilihan data yang relevan, serta membuat kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, atau mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkrip wawancara. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang sangat besar dan kompleks, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kondensasi data bukanlah upaya untuk menghilangkan informasi penting,

tetapi untuk mengorganisasikan dan merangkum data secara sistematis agar relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, dimulai sejak tahap pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

Miles dan Huberman menekankan bahwa kondensasi data melibatkan beberapa langkah, seperti pemilihan data yang relevan, penyederhanaan data tanpa kehilangan makna, pengelompokan data ke dalam kategori atau tema tertentu, dan abstraksi untuk menemukan inti atau makna dari data tersebut. Kondensasi data memiliki tujuan utama untuk membantu peneliti fokus pada informasi penting, menyaring data untuk mendukung analisis yang lebih mendalam, dan menyediakan dasar bagi langkah selanjutnya dalam analisis data, seperti penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵³

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu komponen utama dalam analisis data kualitatif yang berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyusun informasi secara visual atau dalam bentuk narasi terstruktur. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami informasi yang kompleks, mengidentifikasi pola atau hubungan antar data, dan mendukung proses penarikan kesimpulan. Proses ini tidak hanya mempermudah pemahaman terhadap data tetapi juga membantu peneliti dalam menginterpretasikan dan mengambil keputusan secara logis.

⁵³ Miles and Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications (1994): 10-11.

Miles dan Huberman menyebutkan beberapa bentuk penyajian data yang umum digunakan, seperti matriks, grafik, diagram, narasi terstruktur, dan network atau jaringan. Matriks merupakan tabel yang mengorganisasi data ke dalam baris dan kolom, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar kategori atau tema. Grafik dan diagram adalah representasi visual yang menggambarkan pola atau proses tertentu secara lebih jelas. Narasi terstruktur menyajikan data dalam bentuk deskripsi tekstual yang tersusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Sementara itu, network atau jaringan menggambarkan hubungan antar elemen data dalam bentuk peta hubungan, yang cocok untuk menunjukkan interaksi atau alur proses. Selain itu, Miles dan Huberman menekankan bahwa penyajian data adalah proses iteratif, artinya dilakukan secara berulang-ulang sepanjang penelitian. Peneliti dapat terus memperbaiki dan menyusun ulang penyajian data untuk menyesuaikannya dengan temuan baru atau perubahan pemahaman terhadap data. Dengan cara ini, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi tetapi juga sebagai sarana untuk eksplorasi dan analisis yang mendalam.⁵⁴

3. Penarikan dan verifikasi Kesimpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah langkah penting yang mencakup upaya memahami makna data yang telah dikondensasi dan disajikan, serta memastikan validitas kesimpulan yang dihasilkan. Penarikan kesimpulan dimulai sejak awal analisis data, di mana peneliti

⁵⁴ Miles and Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications (1994): 12.

mencari pola, tema, hubungan, atau penjelasan yang muncul dari data. Kesimpulan awal ini sering bersifat sementara dan memerlukan pengujian lebih lanjut. Proses ini melibatkan identifikasi pola dan tema, penjelasan hubungan antar data, serta pengembangan hipotesis sementara berdasarkan data yang tersedia. Setelah kesimpulan awal ditarik, langkah selanjutnya adalah verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan data.

Verifikasi dilakukan melalui triangulasi, pencarian bukti kontradiktif, diskusi dengan kolega, dan referensi silang dengan literatur. Miles dan Huberman juga menekankan bahwa penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah proses iteratif yang berlangsung sepanjang analisis, memungkinkan kesimpulan untuk terus diperbaiki dan disesuaikan dengan temuan baru. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.⁵⁶ Dengan cara ini, keabsahan data yang diteliti akan terjamin dan dianggap valid.

⁵⁵ Miles and Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications (1994): 13.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012): 237.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber melibatkan berbagai informan, situasi di lapangan, dan data dokumentasi. Triangulasi teknik mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Tahap Perencanaan: Tahapan ini mencakup langkah-langkah awal yang diperlukan untuk memulai penelitian:
 - a) Identifikasi Masalah: Menentukan isu atau fenomena yang akan diteliti berdasarkan observasi, literatur, atau kebutuhan tertentu.
 - b) Perumusan Tujuan Dan Pertanyaan Penelitian: Menyusun tujuan penelitian dan pertanyaan yang akan dijawab.
 - c) Kajian Pustaka: Mencari dan menganalisis literatur terkait untuk memahami konteks dan dasar teori penelitian.
 - d) Desain Penelitian:
 - Menentukan jenis penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran).
 - Memilih metode penelitian (survei, eksperimen, studi kasus, dll.).
 - Menentukan variabel, populasi, sampel, dan instrumen pengumpulan data.
- 2) Tahap Pelaksanaan: Tahapan ini fokus pada pelaksanaan kegiatan lapangan atau eksperimen:
 - a) Pengumpulan Data: Melakukan observasi, wawancara, kuesioner,

eksperimen, atau teknik lain sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

- b) Pencatatan dan Dokumentasi: Mendokumentasikan data yang diperoleh secara sistematis dan lengkap.
 - c) Monitoring dan Validasi: Memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan sesuai rencana dan hasil data valid serta reliabel.
- 3) Tahap analisis data: Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan menyusun kerangka laporan hasil analisis. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam laporan:
- a) Pengolahan dan Analisis Data: Mengolah data dengan teknik statistik atau interpretasi tematik sesuai jenis penelitian. Menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis (jika ada).
 - b) Interpretasi Hasil: Menjelaskan temuan penelitian dalam konteks teori, literatur, dan tujuan penelitian.
 - c) Penyusunan Laporan: Menyusun laporan penelitian dalam format yang sesuai (artikel ilmiah, laporan teknis, dll.). Menyertakan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.
 - d) Publikasi dan Diseminasi: Membagikan hasil penelitian kepada pihak yang relevan, seperti melalui jurnal ilmiah, seminar, atau media lainnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

a. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Terdiri dari bidang pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan dan sosial, dan rehabilitasi sosial. Jenis pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, antara lain Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Layanan Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH), Layanan Pendampingan Bagi Lanjut Usia (Lansia), Layanan Pendampingan Penyandang Disabilitas, Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terletak di Jl. Anggrek No. 54, Krajan Patokan, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur.

Instagram : [dinsoskabsitubondo](#)

Email : dinsoskabsit@gmail.com

Website : <https://dinsos.situbondokab.go.id/news/>

b. Visi dan Misi

Visi :⁵⁷

Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan penyandang masalah sosial menuju kondisi masyarakat berketahanan sosial.

Misi :⁵⁸

- 1) Menciptakan perluasan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang peduli pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial melalui optimalisasi pelayanan yang menyentuh pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan peran serta masyarakat, penguatan ketahanan sosial masyarakat dan kepedulian sosial.

c. Motto

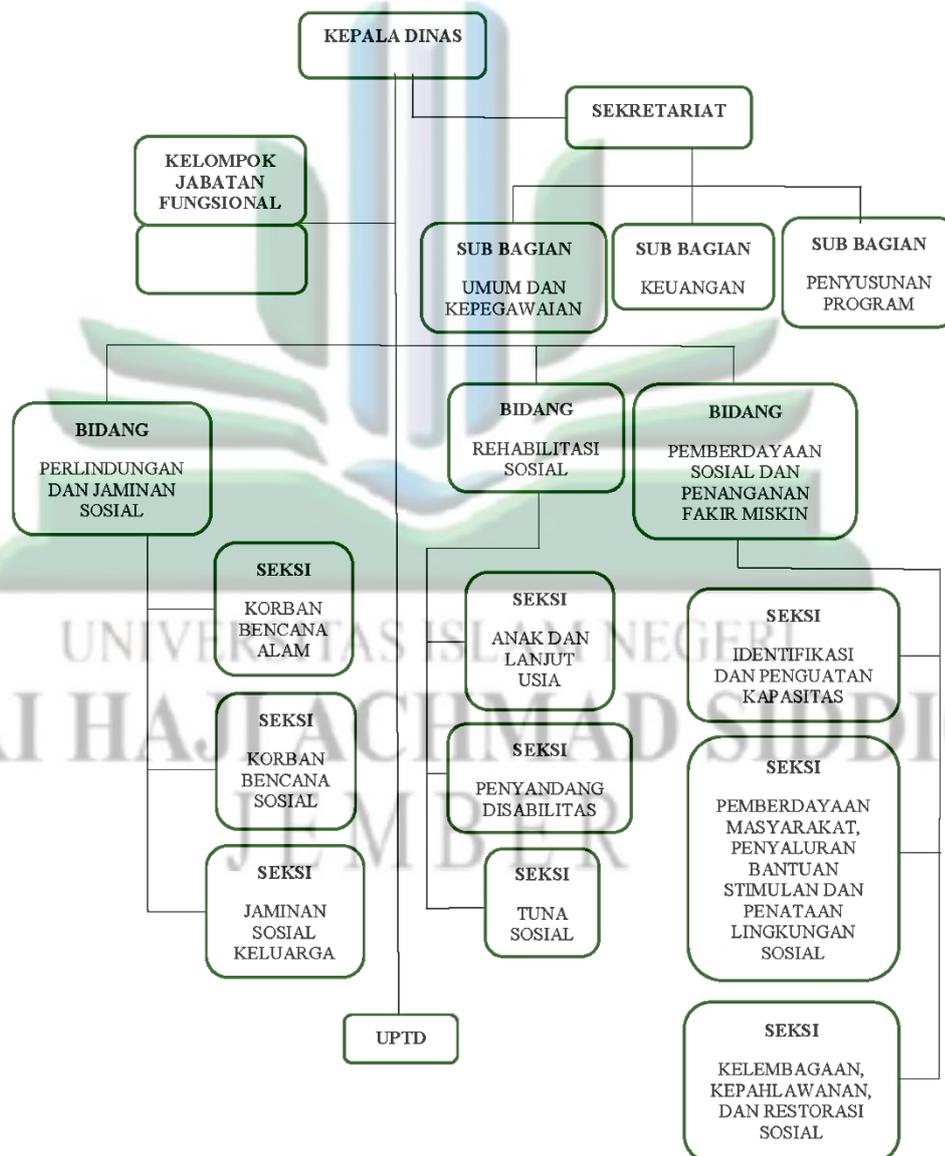
Sinergi, Integritas, Gesit, Akuntabel, Profesional (SIGAP)

⁵⁷ Website Dinsos Kab. Situbondo. <https://dinsos.situbondokab.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 20 Agustus 2024

⁵⁸ Website Dinsos Kab. Situbondo. <https://dinsos.situbondokab.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 20 Agustus 2024

d. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Dalam susunan struktur dibawah ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) termasuk ke dalam bidang rehabilitasi sosial.



Gambar 4.1
Struktur Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

2. Profil TKSK Kabupaten Situbondo

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Merupakan seseorang yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan yang mana merupakan tugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).⁵⁹

b. Logo TKSK



Gambar 4.2 :
Logo TKSK

Logo TKSK memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat keikhlasan, kepedulian dan rasa tanggung jawab serta kesetaraan dalam menangani PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan penetapan logo sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Mampu membangun citra TKSK yang positif, percaya diri dengan potensi dan aktifitas yang dimiliki.

⁵⁹ Kemensos dan TNPPK, Panduan TKSK “Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013” (Jakarta 2013)

⁶⁰ Permensos RI nomor 28 Tahun 2018

- 2) Mampu menggambarkan eksistensi TKSK sebagai insan yang memiliki kepedulian sosial, keiklasan, tanpa memandang perbedaan, optimis dalam menangani PMKS serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Mampu menumbuhkan jiwa korsa, rela berkorban, tanpa pamrih.
- 4) Mampu mengembangkan kepribadian dan mewujudkan aktifitas TKSK yang dapat diterima masyarakat.

Keterangan Bentuk dan Warna Logo:⁶¹

- 1) Tangan bergandengan memiliki arti saling mengenal, percaya, mendukung, fungsi pemberdayaan sosial, memberikan kenyamanan, soliditas dan solidaritas, yang dibangun antara TKSK dengan PMKS. Kedua tangan yang saling bergandengan berwarna biru dan putih memiliki arti bahwa TKSK dengan setulus hati yang ikhlas memberikan motivasi, kepercayaan dan ajakan kepada PMKS untuk beranjak meninggalkan permasalahan sosial yang dialaminya dengan segala potensi yang dimiliki.
- 2) Lingkaran memiliki arti aktifitas TKSK yang berkualitas, bergerak dengan cepat, dinamis tiada henti dan dapat diandalkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Lingkaran berwarna biru memiliki arti TKSK memiliki sifat ingin segera menyelesaikan permasalahan PMKS secara cepat dan bertanggung jawab dan tuntas.

⁶¹ Permensos RI nomor 28 Tahun 2018

- 3) Pita memiliki arti kepedulian sosial dan terikat dengan aturan yang ada. Warna merah putih pada pita memiliki arti rasa nasionalisme dan loyalitas yang harus dijunjung tinggi oleh TKSK dalam menjalankan aktifitasnya.

Arti warna pada logo TKSK:⁶²

- 1) Warna Biru : bermakna ketenangan, profesional dan kepercayaan, serta kehandalan dan bertanggung jawab.
- 2) Warna Putih : bermakna kebebasan, keterbukaan, kesucian, dan keikhlasan.
- 3) Warna Kuning : bermakna keceriaan, menyenangkan dan penuh energi, tetap mengusung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh, dinamis dan dapat dipercaya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya.
- 4) Warna Merah : bermakna memiliki motivasi yang kuat, membangkitkan emosi, dan menciptakan perasaan kegembiraan atau intensitas.

c. Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Tabel 4.1
Daftar nama TKSK⁶³

No	No Induk TKSK	Kecamatan	Nama
1	3512010247	Jatibanteng	Didik Suhardiono, S.E
2	3512010248	Besuki	Vivin Wahdini E, S.Pd.I
3	3512010249	Suboh	Intan Novani Putri
4	3512010250	Mlandingan	Fiqih Priawan ,S.Pd

⁶² Permensos RI nomor 28 Tahun 2018

⁶³ Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 07/5/SK/HK.01/02/2023 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

5	3512010251	Kendit	Suryani
6	3512010252	Panarukan	Jumadi Efendi
7	3512010253	Situbondo	Arief Sumarsono, S.E
8	3512010254	Panji	Aldi Prayoga Aji Darma
9	3512010255	Mangaran	Moh.Lutfi Jalil
10	3512010256	Kapongan	Taufiq Hasan
11	3512010257	Arjasa	Anshar Afandi
12	3512010258	Jangkar	Ali Ridha
13	3512010259	Asembagus	Badri
14	3512010260	Banyuputih	Resti Anggraini Dutawati
15	3512010261	Sumbermalang	Rujianto
16	3512010262	Banyuglugur	Moch. Lutfi
17	3512010263	Bungatan	Nurhalik

d. Profil Lokasi Penelitian

1) Kecamatan Banyuputih

Terletak diujung timur Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah 390,88 km².⁶⁴ Wilayah ini memiliki jarak sekitar 35 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Asembagus. Kecamatan Banyuputih terdiri dari 5 desa diantaranya adalah Desa Banyuputih, Sumberejo, Sumberanyar, Sumberwaru, dan Desa Wonorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 51.685 jiwa.⁶⁵ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Banyuputih bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

2) Kecamatan Asembagus

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

Terletak sekitar 26 km dari pusat kota dengan luas wilayah 226,05 km².⁶⁶ Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bondowoso dan kabupaten banyuwangi, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan jangkar dan kecamatan arjasa. Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 desa diantaranya adalah Desa Asembagus, Awar-awar, Bantal, Gudang, Kedunglo, Kertosari, Mojosari, Perante, Trigonco, Wringinanom dengan jumlah penduduk sebanyak 49.625 jiwa.⁶⁷ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Asembagus bekerja di di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pedagang.

3) Kecamatan Arjasa

Terletak sekitar 15 km dari pusat kota dengan luas wilayah 185,15 km².⁶⁸ Sebelah utara berbatasan dengan selat madura, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan jangkar dan asembagus, Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bondowoso, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kapongan dan kab. bondowoso. Kecamatan Arjasa terdiri dari 8 desa diantaranya adalah Desa Arjasa, Bayeman, Curah Tatal, Jatisari, Kayumas, Kedungdowo, Ketowan, dan Desa Lamongan

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

⁶⁷ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

dengan jumlah penduduk sebanyak 43.301 jiwa.⁶⁹ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Arjasa bekerja di di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

4) Kecamatan Mangaran

Terletak sekitar 6 km dari pusat kota dengan luas wilayah 37,18 km².⁷⁰ Sebelah utara berbatasan dengan selat madura, Sebelah timur berbatasan dengan selat madura, Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan situbondo, panji, dan kapongan, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan panarukan, dan selat madura. Kecamatan Mangaran terdiri dari 6 desa diantaranya adalah Desa Arjasa, Bayeman, Curah Tatal, Jatisari, Kayumas, Kedungdowo, Ketowan, dan Desa Lamongan dengan jumlah penduduk sebanyak 34.988 jiwa.⁷¹ Sebagian besar masyarakat

Kecamatan Mangaran bekerja di bidang di sektor pertanian, peternakan, dan pedagang.

5) Kecamatan Mlandingan

Terletak sekitar 31 km dari pusat kota dengan luas wilayah 54,88 km².⁷² Sebelah utara berbatasan dengan selat madura, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan bungatan, Sebelah

⁶⁹ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

⁷¹ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

selatan berbatasan dengan kabupaten bondowoso, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan suboh. Kecamatan Mlandingan terdiri dari 7 desa yakni Desa Mlandingan Kulon, Selomukti, Sumber Pinang, Trebungan, Sumber Anyar, Campoan, dan Desa Alas Bayur dengan jumlah penduduk sebanyak 24.393 jiwa.⁷³ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mlandingan bekerja di di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

6) Kecamatan Suboh

Terletak sekitar 35 km dari pusat kota dengan luas wilayah 30,70 km².⁷⁴ Sebelah utara berbatasan dengan selat madura, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mlandingan, Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan sumbermalang dan kab. bondowoso, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan besuki, dan sumbermalang. Kecamatan Suboh terdiri dari 8 desa diantaranya adalah Desa Buduan, Cemara, Dawuan, Gunung Malang, Gunung Putri, Ketah, Mojodungkol, dan Desa Suboh dengan jumlah penduduk sebanyak 28.580 jiwa.⁷⁵ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Suboh bekerja di bidang di sektor pertanian, dan peternakan.

⁷³ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

⁷⁵ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

7) Kecamatan Besuki

Terletak sekitar 38 km dari pusat kota dengan luas wilayah 27,70 km².⁷⁶ Sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Suboh, Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jatibanteng, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banyuwangi. Kecamatan Besuki terdiri dari 10 desa yakni Desa Kalimas, Widoropayung, Bloro, Besuki, Demung, Jetis, Langkap, Pesisir, Blimbing, dan Desa Sumberejo, dengan jumlah penduduk sebanyak 65.481 jiwa.⁷⁷ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Besuki bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pedagang, dan jasa.

8) Kecamatan Sumbermalang

Terletak sekitar 55 km dari pusat kota dengan luas wilayah 89,76 km².⁷⁸ Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Jatibanteng, Suboh, Besuki Sebelah timur berbatasan dengan kab Bondowoso, Sebelah selatan berbatasan dengan kab Bondowoso, Sebelah barat berbatasan dengan kab. Probolinggo. Kecamatan Sumbermalang terdiri dari 9 desa diantaranya adalah Desa Alastengah, Baderan, Kalirejo, Plalangan, Sumberargo, Taman, Tamansari, Tamankursi, dan Desa Tlogosari dengan jumlah

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

⁷⁷ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 50.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024", Vol 47, 2024, Hal 8.

penduduk sebanyak 28.559 jiwa.⁷⁹ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sumbermalang bekerja di di sektor pertanian, dan peternakan.

9) Kecamatan Banyuglugur

Terletak sekitar 47 km dari pusat kota dengan luas wilayah 67,33 km².⁸⁰ Sebelah utara berbatasan dengan selat madura, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan beuski, Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan jatibanteng, Sebelah barat berbatasan dengan kab. probolinggo. Kecamatan banyuglugur terdiri dari 7 desa diantaranya adalah Desa Buduan, Cemara, Dawuan, unung malang, gunung putri, ketah, mojudungkol, suboh, dengan jumlah penduduk sebanyak 23.984 jiwa.⁸¹ Sebagian besar masyarakat Kecamatan Banyuglugur bekerja di di sektor pertanian, peternakan, dan perikan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil pendataan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Situbondo tahun 2023:⁸²

Tabel 4.2
Data PMKS Kab. Situbondo Tahun 2023

No	Kecamatan	PMKS Fakir Miskin	PMKS Penyandang Disabilitas
1	Banyuglugur	75	158

⁷⁹ Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024”, Vol 47, 2024, Hal 50.

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, “Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024”, Vol 47, 2024, Hal 8.

⁸¹ Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Situbondo Regency In Figures) 2024”, Vol 47, 2024, Hal 50.

⁸² Pemerintah Kab. Situbondo, pendataan PMKS 2023 Dinas Sosial (Situbondo 2023)

2	Besuki	39	155
3	Suboh	276	143
4	Sumbermalang	677	101
5	Jatibanteng	249	92
6	Mlandingan	321	85
7	Bungatan	70	9
8	Kendit	12	140
9	Panarukan	222	134
10	Situbondo	15	130
11	Panji	246	121
12	Mangaran	250	177
13	Kapongan	136	126
14	Arjasa	523	-
15	Jangkar	25	62
16	Asembagus	221	230
17	Banyuputih	682	108

Jumlah total PMKS di Kabupaten Situbondo : 7.939 Orang.⁸³

Tabel 4.3
Daftar 5 tertinggi PMKS fakir miskin

No	Nama Kecamatan	Jumlah PMKS Fakir Miskin
1	Kecamatan Banyuputih	682 Orang
2	Kecamatan Sumbermalang	677 Orang
3	Kecamatan Arjasa	523 Orang
4	Kecamatan Mlandingan	321 Orang
5	Kecamatan Suboh	276 Orang

Tabel 4.4
Daftar 5 tertinggi PMKS penyandang disabilitas

No	Nama Kecamatan	Jumlah PMKS Penyandang Disabilitas
1	Kecamatan Asembagus	230 Orang
2	Kecamatan Mangaran	177 Orang
3	Kecamatan Banyuglugur	158 Orang
4	Kecamatan Besuki	155 Orang
5	Kecamatan Suboh	143 Orang

⁸³ Pemerintah Kab. Situbondo, pendataan PMKS 2023 Dinas Sosial (Situbondo 2023)

1. Efektivitas Program TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat kecamatan. Di Kabupaten Situbondo, seperti di daerah lainnya, penting dalam menangani berbagai masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. PMKS mencakup berbagai kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, dan lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Intan selaku TKSK Suboh pada saat diwawancarai:⁸⁴

“...kalo TKSK sendiri sebenarnya tidak punya program dek, yang punya program itu dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten, ya tugas kita ini cuma menjalankan programnya. Tujuannya untuk membantu pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi PMKS...”

Tugas dan fungsi TKSK dalam penanganan PMKS ini ialah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial khususnya di Kabupaten Situbondo. Menurut data yang diperoleh kategori PMKS yang paling tinggi di Kabupaten Situbondo adalah fakir miskin dan penyandang disabilitas. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program TKSK dalam menangani PMKS di Kabupaten Situbondo terdapat beberapa indikator yang perlu

⁸⁴ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

diperhatikan, diantaranya adalah:

a. Ketepatan Sasaran

Dalam hal ini, ketepatan sasaran merujuk pada jangkauan program penanganan masyarakat yang tergolong dalam kategori PMKS (seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan sebagainya), dan untuk mengetahuinya dapat diukur melalui indikator data penerima manfaat yang kemudian diverifikasi serta validasi dan pendistribusian bantuan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Badri selaku TKSK Asembagus pada saat diwawancarai:⁸⁵

“...biasanya TKSK mintak data dari desa terkait dengan PMKS tersebut, yang kemudian nantinya diidentifikasi ke lokasi masing-masing sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagai data penerima manfaat. Nah disitu kami terjun langsung untuk proses verifikasi dengan mintak si penerima itu menyerahkan bukti adminduk untuk verifikasi kelengkapan data dan menyesuaikan dengan data penerima yang sudah ada. Baru kemudian kalo data sudah lengkap diajukan lagi ke dinsos, dan kalo divalidasi baru nanti ada kunjungan lagi untuk proses pendistribusian bantuan yang dibuktikan melalui foto dokumentasi bahwa penerima telah mendapatkan bantuan setelah dinyatakan sesuai dengan data penerima dan cek verifikasi serta validasi...”

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Satina selaku penerima manfaat program bantuan dari TKSK:⁸⁶

“...kadang orang mampu ketika tau kalo ada bantuan pura-pura jadi tidak mampu biar dapat bantuan sedangkan yang benar-benar gak mampu gadapet bantuan. penting kalo di cek satu-satu biar tepar sasaran bisa tau mana yang mampu, mana yang gak mampu. saya ditanyakan sama TKSK biasanya penghasilan,

⁸⁵ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

⁸⁶ Ibu Satina diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 21 oktober 2024

pengeluaran saya, pekerjaan saya suami saya macem-macem. Tapi ya saya jawab adanya gini dah....”

Dari hasil observasi peneliti bahwa data yang diterima dari desa oleh TKSK tidak semua sesuai dengan keadaan seseorang. Maka dari itu benar adanya untuk menjalankan program agar tepat sasaran, TKSK datang ke lokasi memverifikasi dan memvalidasi untuk memastikan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan keadaan orang tersebut.

b. Sosialisasi Program

Dalam hal ini, sosialisasi program TKSK ini sangat penting agar masyarakat mengetahui adanya program ini serta memahami bagaimana cara mereka dapat mengakses layanan yang disediakan. Beberapa faktor penentu efektivitas sosialisasi program adalah kemudahan akses layanan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi serta respon masyarakat akan sosialisasi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai:⁸⁷

“...untuk sosialisasi program biasanya TKSK langsung (*door to door*) lewat rumah ke rumah, kadang dikumpulkan di desa, di kecamatan, kadang ya juga lewat media sosial kayak wa, facebook, instagram, baik itu dengan buat pamflet ataupun sebar pemberitahuan kepada pemerintah desa yang kemudian bisa di *share* ke bawahannya...”

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Norsia selaku penerima

⁸⁷ Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

manfaat pada saat diwawancarai:⁸⁸

“...kemarin saya dapat bantuan tongkat sensorik, saya dikasik tau sama perangkat desa sama dimintai ktp, kk buat persyaratan pengajuan, katanya ada info dari status wanya TKSK bahwasanya yang butuh tongkat sensorik bisa menghubunginya...”

Dari hasil observasi peneliti bahwa sosialisasi program bisa didapatkan dari berbagai cara bisa secara langsung dengan *door to door*, adapula yang dalam bentuk sosialisai melalui media *online* dengan mengirimkan pamflet atau informasi yang dapat di *share* ke orang-orang serta juga bisa dapat mengumpulkan orang di sutau tempat kemudian dilakukan sosialisasi.



Gambar 4.3
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi pendataan PMKS⁸⁹

⁸⁸ Ibu Norsia diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 26 Agustus 2024

c. Tujuan Program

Dalam hal ini, tujuan program yang dirancang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Efektivitas program ini bisa dinilai melalui seberapa jauh program telah mencapai tujuannya, seperti pengentasan kemiskinan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat agak bisa mandiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai:⁹⁰

“...ya program itu dibuat untuk kepentingan masyarakat dek, dan TKSK menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi apa yang diinginkan masyarakat atau masalah apa yang terjadi di masyarakat pemerintah hadir lewat TKSK itu yang salah satu tugasnya untuk mengentaskan atau menangani PMKS agar supaya ia dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa menjadikannya mandiri...”

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Fifin selaku pihak Dinas Sosial bahwa:⁹¹

“...tujuan program yang dijalankan oleh TKSK itu dek untuk kepentingan masyarakat, mulai dari yang tidak mampu, disabilitas, anak yang tidak sekolah tujuannya yaitu dek agar bisa setara dengan yang lai. Kinerja TKSK ini bagus untuk pengentasan PMKS di kecamatan. TKSK ini menjadi ujung tombak bagian sosial..”

Dari hasil observasi peneliti bahwa tujuan program untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat PMKS agar dapat berdaya seperti masyarakat sosial lainnya.

⁸⁹ Dinas Sosial Kab. Situbondo, <https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>, diakses pada 20 Agustus 2024

⁹⁰ Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

⁹¹ Ibu Fifin diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 9 September 2024

d. Pemantauan Program

Dalam hal ini, pemantauan program sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pemantauan bisa dilihat dari sistem monitoring dan evaluasi untuk menyesuaikan penyesuaian program yang melibatkan masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai:⁹²

“...proses monitoring dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui bantuan yang diberikan kira-kira digunakan sebagaimana mestinya apa tidak, dan hal itu juga disesuaikan dengan langkah-langkah penyesuaian program yang juga melibatkan masyarakat penerima manfaat itu sendiri...”.

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Satina penerima manfaat bahwa:⁹³

“...setiap kurang lebih 1 bulan sekali pasti ada survey. Yang ditanya pasti bantuan kemaren digunakan untuk apa, masih ada atau ndak, sama menegecek kondisi keadaan saya...”

Dari hasil observasi peneliti bahwa pemantauan program dilakukan oleh TKSK untuk memastikan kegunaan bantuan apakah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Karena terkadang bantuan yang biasanya diberikan ada yang digunakan sebagaimana mestinya dan adapula yang digunakan untuk kebutuhan lainnya.

2. Peran TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan salah

⁹² Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

⁹³ Ibu Satina diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 4 Oktober 2024

satu unsur penting dalam mendukung program kesejahteraan sosial, termasuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai wilayah, khususnya Kabupaten Situbondo. PMKS sendiri merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial ekonomi dan membutuhkan bantuan serta perlindungan dari pemerintah. Peran TKSK dalam menangani PMKS sangat krusial, karena mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Berikut adalah penjelasan peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo menurut Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018:⁹⁴

a. Peran Koordinasi

Peran koordinasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Situbondo salah satu aktor kunci dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo. TKSK memegang peran penting dalam memastikan program-program pemerintah untuk kesejahteraan sosial terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu peran utama TKSK yang sangat menentukan keberhasilan penanganan PMKS adalah peran koordinasi.

Bentuk peran koordinasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah :

⁹⁴ Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018

1) Saling Memberikan Informasi

Proses pertukaran informasi antara TKSK dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial, lembaga pelayanan kesehatan, pendidikan, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memperlancar koordinasi antar pihak dalam penanganan PMKS serta memastikan setiap tindakan yang diambil berdasarkan data dan informasi yang akurat. Adanya saling memberikan informasi tersebut, kordinasi bisa menjadi efektif antar berbagai pihak dan bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan memantau progres penanganan PMKS.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Intan selaku TKSK Suboh pada saat diwawancarai:⁹⁵

“...saling memberikan informasi sangat penting dek, biar kita tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum, dan juga program bantuannya tidak tumpang tindih, informasi yang dibutuhkan juga harus valid, akurat untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan kondisi di lapangan...”

Jenis informasi yang sering kali dipertukarkan oleh TKSK dengan pihak-pihak terkait adalah berupa data PMKS mengenai profil dan kebutuhan PMKS itu sendiri, informasi program bantuan mengenai program yang sedang berjalan dan jenis bantuan yang diberikan serta informasi rujukan, dan informasi pelaksanaan program.

⁹⁵ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

Untuk prosesnya menurut Ibu Intan selaku TKSK Suboh pada saat diwawancarai:⁹⁶

“...yang pertama adalah TKSK mencari informasi dari lapangan dulu, baik pake cara interaksi langsung, maupun kunjungan ke rumah-rumah (*door to door*). Lalu, informasi itu disebarkan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan dengan cara, mengadakan agenda pertemuan rutin, ataupun laporan tertulis, nah baru setelah itu pihak penerima umpan balik yang membantu TKSK dalam memperbaiki cara atau strategi penanganan di lapangan...”

Dalam pelaksanaannya, contoh saling memberikan informasi dapat berupa:

- a) Koordinasi penanganan fakir miskin jika terjadi masalah pada fakir miskin yang membutuhkan kebutuhan ekonominya. Maka dari itu, TKSK berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikannya pelatihan keterampilan kerja. Tujuannya, ketika sudah mengikuti dan melaksanakan pelatihan, seorang tersebut bisa menerapkan dan mengembangkan apa yang dia dapat pada saat mengikuti pelatihan keterampilan tersebut, sehingga dia akan mandiri karena mempunyai penghasilan sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
- b) Koordinasi penanganan penyandang disabilitas Jika terjadi masalah pada penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan. Maka dari itu, TKSK berkoordinasi

⁹⁶ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

dengan puskesmas atau layanan kesehatan lainnya untuk memberikan layanan kesehatan kepada si penyandang disabilitas tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran koordinasi dengan saling memberikan informasi antara TKSK dengan pihak lainnya dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo adalah proses vital yang memungkinkan TKSK dan instansi terkait bekerja sama agar supaya lebih efektif dan efisien. Dengan berbagi informasi yang tepat, semua pihak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2) Menyamakan Persepsi

Proses dimana TKSK dan pihak-pihak terkait (Dinas Sosial, lembaga kesehatan, pendidikan, masyarakat, dan instansi lainnya) memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani PMKS. Proses ini sangat penting agar semua pihak yang terlibat memiliki tujuan, strategi, dan metode yang selaras dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Seperti yang dikatakan oleh Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai:⁹⁷

“...menyamakan persepsi ini dilakukan untuk membangun kesepahaman yang sama tentang masalah yang terjadi,

⁹⁷ Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

kayak bagaimana penanganannya, solusinya. Ya biar koordinasinya mudah dan serta program bantuan yang diberikan bisa berjalan lancar. Nah misal semua pihak udah punya persepsi yang sama tentang kondisi dan kebutuhan PMKS, ya kita tinggal mengambil keputusan yang sekiranya tepat untuk menangani masalah kesejahteraan sosial tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih program bantuan...”

Untuk proses pelaksanaannya menurut Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai:⁹⁸

“...prosesnya bisa dilakukan dengan diskusi dan mengadakan pertemuan (rakor) antar pihak seperti dinsos, puskesmas, sekolah, atau lembaga terkait. Nahh disitu didiskusikan masalah PMKS yang terjadi di lapangan. Saling berbagi pandangan dan mencari kesepakatan mengenai langkah-langkah apa yang bisa diambil. Baru setelah itu menyelaraskan data dan informasi antara TKSK dan pihak terkait biar tau valid ndaknya data itu, semisal ada kekeliruan atau tidak sama ya dievaluasi disitu. Kalo semua pihak sudah mencapai kesepakatan, baru bisa bisa dirumuskan kebijakan atau rencana aksi apa yang cocok untuk penanganan PMKS tersebut, dan setiap pihak akan memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan fungsi mereka masing-masing...”

Dalam pelaksanaannya contoh menyamakan persepsi dapat berupa:

- a) Mengadakan rapat koordinasi rutin antara Dinas Sosial, puskesmas, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk membahas perkembangan terbaru tentang PMKS, serta strategi penanganan yang akan diterapkan.
- b) Sosialisasi program jika terdapat program kesejahteraan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah. Disitu, TKSK dan instansi

⁹⁸ Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

terkait dapat melakukan sosialisasi bersama agar supaya nantinya semua pihak memahami akan tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan program tersebut.

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran koordinasi dengan menyamakan persepsi antara TKSK dengan pihak lainnya dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Ini membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, mempermudah koordinasi, dan memperkuat kerjasama antar instansi.

3) Membangun Kesepakatan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Proses mencapai persetujuan bersama antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kesepakatan ini penting untuk memastikan adanya kerjasama yang harmonis, sinergi dalam pelaksanaan program, dan kejelasan peran serta tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Resty selaku TKSK Banyuputih pada saat diwawancarai:⁹⁹

“...membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu dilakukan untuk memperjelas tugas

⁹⁹ Ibu Resty diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

dan tanggung jawab masing-masing pihak dek, termasuk TKSK, dinas sosial, lembaga kesehatan, pendidikan, serta organisasi masyarakat, dalam penanganan PMKS, biar setiap program dan kebijakan dalam penanganan PMKS berjalan dengan baik. Nah, kesepakatan yang dibangun tujuannya untuk menyatukan arah kerja berbagai pihak biar fokus pada tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS di Kabupaten Situbondo...”

Menurut Ibu Resty selaku TKSK Banyuputih pada saat diwawancarai prosesnya adalah:¹⁰⁰

“...mengadakan diskusi antar lembaga terkait untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh PMKS. Baru dilakukan analisis kebutuhan, baik dari segi bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, maupun rehabilitasi sosial. Nah perlu juga adanya negosiasi dari semua pihak untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari programnya, misal TKSK bertanggung jawab atas pendataan pmks, dinas sosial bertanggung jawab atas distribusi bantuan. Nah disitu juga saling konsultasi antara TKSK dan Dinas Sosial atas kebijakan tersebut, kiranya dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Baru setelah disepakati menyusun rencana aksi bersama tentang detail pelaksanaan program, seperti jadwal pelaksanaan program, bagaimana program penanganan pmks, bagaimana monitoring dan evaluasinya akan dilakukan. Nah kesepakatan ini nanti didokumentasikan dalam bentuk tanda tangan kesepakatan perjanjian kerjasama (*mou*) untuk memastikan semua pihak berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat, dan menjadi dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan...”

Dalam pelaksanaanya contoh membangun kesepakatan dapat berupa:

- a) Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait misal dengan dinas sosial, puskesmas, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan utama yang

¹⁰⁰ Ibu Resty diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

dihadapi oleh PMKS, seperti masalah anak jalanan, lansia terlantar, atau keluarga miskin.

- b) Membentuk kesepakatan pembagian tanggung jawab misalnya TKSK bertugas melakukan pendataan dan memberikan pendampingan sosial, sementara puskesmas memberikan layanan kesehatan, dan dinas sosial menyediakan bantuan.
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program yang mencakup jadwal, alokasi sumber daya, dan indikator keberhasilan. Sehingga semua pihak sepakat untuk menjalankan program sesuai peran masing-masing.



Gambar 4.4
Koordinasi dan konsultasi untuk penyandang disabilitas¹⁰¹

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran koordinasi dengan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

¹⁰¹ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024

di Kabupaten Situbondo adalah proses penting untuk memastikan keberhasilan program penanganan PMKS. Dengan membangun kesepakatan, berbagai pihak yang terlibat dapat berkoordinasi secara efektif, membagi peran dan tanggung jawab dengan jelas, serta melaksanakan program secara lebih efisien dan terarah. Meskipun ada tantangan dalam proses ini, seperti perbedaan kepentingan dan komitmen yang tidak konsisten, upaya membangun kesepakatan akan menghasilkan kerjasama yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal dalam penanganan PMKS.

b. Peran Fasilitasi

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai fasilitasi sangat penting dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai fasilitasi, TKSK bertugas mendampingi dan memandu masyarakat dalam mengakses berbagai program kesejahteraan sosial, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Melalui peran ini, TKSK tidak hanya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan mendorong solusi yang berkelanjutan bagi masalah-masalah sosial di tingkat kecamatan.

Bentuk peran fasilitasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Situbondo

adalah :

1) Pendampingan Sosial

Bentuk pelayanan dan dukungan yang diberikan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal ini bentuk pendampingan sosial yang dilakukan oleh TKSK terhadap PMKS berupa pendampingan kasus yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi PMKS.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Lutfi selaku TKSK Mangaran pada saat diwawancarai:¹⁰²

“...tujuan pendampingan sosial sendiri yaitu untuk membantu PMKS agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang, serta memberikan akses informasi kepada PMKS terkait program-program kesejahteraan sosial yang ada, kemudian untuk menghubungkan PMKS dengan pihak-pihak terkait (misal, dinas sosial, lembaga kesehatan, pendidikan, atau pelatihan kerja) untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka...”

Untuk prosesnya menurut Bapak Lutfi selaku TKSK Mangaran pada saat diwawancarai:¹⁰³

“...Proses pendampingan sosial berupa Identifikasi dan verifikasi warga yang tergolong PMKS, seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam. Setelah teridentifikasi baru merancang program sesuai masalah sosial yang dihadapi bisa berupa pemberian bansos langsung atau layanan yang lebih spesifik. TKSK ini mas menjadi penghubung antara PMKS dan program-program pemerintah, seperti PKH, BPNT, KIP, maupun layanan kesehatan lainnya TKSK juga

¹⁰² Bapak Lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 13 Agustus 2024

¹⁰³ Bapak Lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 13 Agustus 2024

memantau perkembangan PMKS setelah menerima bantuan, dan memastikan bahwa intervensi yang diberikan berjalan sesuai rencana...”

Dalam pelaksanaannya contoh pendampingan sosial yang dilakukan oleh TKSK di Kabupaten Situbondo adalah:

- a) Pada PMKS fakir miskin TKSK membantu mengidentifikasi keluarga miskin yang layak menerima bantuan sosial dan mendampingi mereka dalam proses pencairan bantuan sehingga setiap individu yang tergolong PMKS mendapatkan perhatian yang layak dan dapat hidup lebih baik melalui intervensi kesejahteraan sosial yang tepat.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Resty selaku TKSK Banyuputih pada saat diwawancarai :¹⁰⁴

“...bantuan sosial yang diberikan untuk saat ini berupa sembako. Kalo dulu biasanya berupa tunai atau BST itu dek. Kadang juga berupa modal usaha, dikasik rombongan untuk jualan, yaa tergantung nanti kebutuhannya juga. Tetapi ya itu dek dari TKSK juga mengecek mulai dari administrasi sampe persyaratan kelengkapan yang dibutuhkan nanti, jadi tidak moro-moro memberikan bantuan gitu, tetapi tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami pernah juga waktu itu kartu atmnya tidak bisa dicairkan kami bantu urus ke Bank BNI sampai benar-benar bisa dicairkan, itu semua beberapa bentuk pendampingan sosial yang kami TKSK lakukan ...”

¹⁰⁴ Ibu Resti diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024



Gambar 4.5
Pendampingan pembagian bantuan sosial¹⁰⁵

- b) Pada PMKS penyandang disabilitas TKSK memberikan pendampingan bagi masyarakat PMKS penyandang disabilitas dan memastikan bahwa setiap individu yang tergolong PMKS mendapatkan perhatian yang layak dan dapat hidup lebih baik melalui intervensi kesejahteraan sosial yang tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰⁵ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024



Gambar 4.6
Pendampingan penyaluran bantuan¹⁰⁶

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran fasilitasi melalui pendampingan sosial di Kabupaten Situbondo sangat penting karena mereka berada di garda terdepan dalam upaya penanganan masalah sosial. Mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah dapat sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Pendampingan sosial oleh TKSK ini juga membantu memastikan bahwa setiap individu yang tergolong PMKS mendapatkan perhatian yang layak dan dapat hidup lebih baik melalui intervensi kesejahteraan sosial yang tepat.

2) Bimbingan Sosial

¹⁰⁶ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024

Kegiatan yang bertujuan memberikan arahan, motivasi, dan pengetahuan kepada PMKS agar mereka bisa mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi. Bimbingan ini berfokus pada pengembangan kemampuan individu dan keluarga untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan sosial mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Badri selaku TKSK Asembagus pada saat diwawancarai:¹⁰⁷

“...tujuan bimbingan sosial yaitu untuk membantu PMKS mengembangkan kemampuan mereka agar dapat hidup mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Memberikan edukasi terkait keterampilan atau pengetahuan praktis yang bisa meningkatkan potensi diri dan daya saing PMKS, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Serta membimbing PMKS untuk keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah dan mendorong mereka agar lebih produktif...”

Menurut Bapak Badri selaku TKSK Asembagus pada saat diwawancarai:¹⁰⁸

“...bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK di Kabupaten Situbondo dengan memberikan informasi mengenai hak mereka terhadap program-program sosial yang disediakan oleh pemerintah, memberikan bimbingan berupa motivasi untuk membantu mereka bangkit dan melihat peluang dalam situasi sulit bagi PMKS yang mengalami masalah psikologis akibat tekanan ekonomi atau sosial, membimbing PMKS dalam mengembangkan kemampuannya seperti keterampilan wirausaha, kerajinan tangan, atau keterampilan kerja lainnya sehingga mereka dapat kembali diterima secara sosial...”

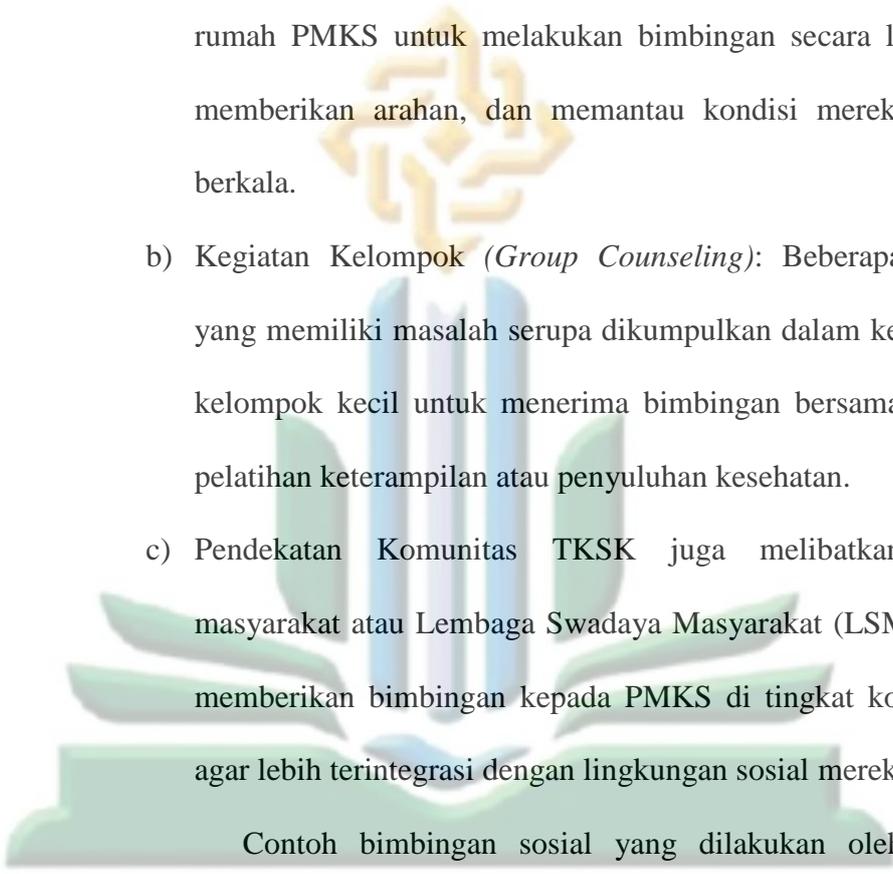
Jenis bimbingan sosial yang diberikan oleh TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo juga berupa:

¹⁰⁷ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

¹⁰⁸ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

- a) Bimbingan Keterampilan (*Skill Training*): TKSK sering mengorganisir pelatihan keterampilan bagi PMKS yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha kecil atau mendapatkan pekerjaan. Misalnya, pelatihan menjahit, bertani, berdagang, atau keterampilan lain yang relevan di daerah tersebut.
- b) Bimbingan Ekonomi: Edukasi terkait pengelolaan keuangan, termasuk cara memanfaatkan bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan usaha produktif, agar PMKS dapat bertransisi dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri secara finansial.
- c) Bimbingan Psikososial: TKSK memberikan dukungan emosional dan sosial kepada PMKS yang mengalami trauma atau masalah mental akibat tekanan sosial, kemiskinan, atau bencana alam. Misalnya, anak-anak terlantar atau korban kekerasan mendapatkan bimbingan untuk memulihkan kesehatan mental mereka.
- d) Bimbingan Pendidikan: Anak-anak PMKS, terutama yang putus sekolah, sering mendapatkan bimbingan pendidikan, baik berupa pengajaran langsung maupun rujukan ke program beasiswa, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Bentuk bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK di Kabupaten Situbondo berupa:

- 
- a) Kunjungan Rumah (*Home Visits*): TKSK mendatangi rumah-rumah PMKS untuk melakukan bimbingan secara langsung, memberikan arahan, dan memantau kondisi mereka secara berkala.
- b) Kegiatan Kelompok (*Group Counseling*): Beberapa PMKS yang memiliki masalah serupa dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk menerima bimbingan bersama, seperti pelatihan keterampilan atau penyuluhan kesehatan.
- c) Pendekatan Komunitas TKSK juga melibatkan tokoh masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan bimbingan kepada PMKS di tingkat komunitas, agar lebih terintegrasi dengan lingkungan sosial mereka.

Contoh bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK

dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo adalah:

- a) Pada PMKS fakir miskin TKSK memberikan pelatihan keterampilan usaha kecil serta membantu keluarga miskin memanfaatkan bantuan ekonomi dari pemerintah secara bijaksana guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.



Gambar 4.7
Pengiriman peserta pelatihan keterampilan¹⁰⁹

- b) Pada PMKS penyandang disabilitas TKSK memberikan akses terhadap layanan berupa bimbingan psikososial bagi PMKS yang mengalami trauma atau masalah mental akibat tekanan sosial, *bulying* atas disabilitas yang dialami sehingga mendapatkan bimbingan untuk memulihkan kesehatan mental mereka kembali.

¹⁰⁹ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
 diakses pada 20 Agustus 2024



Gambar 4.8
Pelatihan bagi penyandang disabilitas¹¹⁰

Begitupula yang dikatakan oleh Bapak Badri selaku

TKSK Asembagus pada saat diwawancarai :¹¹¹

“...selain itu ada juga program pelatihan keterampilan. Jadi, PMKS yang memiliki keterampilan atau *skill* namun dia memiliki keterbatasan fisik ataupun ekonomi bisa diikutsertakan juga. Biasanya ada lembaga yang mengadakan seperti itu, dan yang sering itu di Mahadmiya Bali. Itu biasanya nginep dek, dan setelah mengikuti itu pasti dapat uang saku serta peralatannya sesuai dengan bidang keterampilan yang diikuti. Enak dek, sudah dapat ilmu, sek dibayar, penginapan gratis, makan, transport ditanggung semua, enak pokok dah...”

¹¹⁰ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024

¹¹¹ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024



Gambar 4.9
Kegiatan pengembangan potensi pada PMKS¹¹²

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran fasilitasi melalui bimbingan sosial yang diberikan oleh TKSK di Kabupaten Situbondo merupakan komponen penting dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Melalui bimbingan ini, TKSK tidak hanya membantu PMKS secara material, tetapi juga memberdayakan mereka untuk dapat hidup lebih mandiri dan berdaya secara sosial serta ekonomi. Dengan demikian, bimbingan sosial ini berperan signifikan dalam mengurangi masalah kesejahteraan sosial di daerah tersebut.

¹¹² Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024

3) Kemitraan

Strategi yang digunakan oleh TKSK untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan memastikan bahwa PMKS mendapatkan akses terhadap sumber daya dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Mas Lutfi selaku TKSK Banyuglugur pada saat diwawancarai:¹¹³

“...Tujuan kemitraan yaitu memperluas jangkauan layanan yang melibatkan lebih banyak lembaga atau organisasi yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan kepada PMKS, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Kemitraan membantu TKSK mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bentuk pendanaan, tenaga kerja, atau fasilitas. Dengan melibatkan berbagai pihak, pelayanan kepada PMKS menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran karena setiap mitra memiliki keahlian atau layanan khusus yang dibutuhkan oleh PMKS. Sedangkan tujuan rujukan adalah untuk menghubungkan PMKS dengan layanan yang lebih sesuai, misalnya layanan medis khusus atau bantuan hukum. Karena, tidak semua masalah PMKS bisa diselesaikan langsung oleh TKSK. Sehingga penanganan masalah PMKS berlangsung lebih cepat dan efektif. Seperti jika ada korban kekerasan dalam rumah tangga, memerlukan rujukan ke layanan psikologis atau hukum yang lebih spesifik...”

Jenis-jenis Kemitraan:

- a) Kemitraan dengan Pemerintah Daerah: TKSK bekerjasama dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan instansi lain yang relevan untuk menyediakan program kesejahteraan sosial bagi PMKS.

¹¹³ Mas Lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 5 September 2024

Seperti yang dikatakan oleh ibu Ely selaku Kasi Sosial Kecamatan Asembagus pada saat diwawancarai :¹¹⁴

“...iya, kalo dari Kecamatan sering koordinasi dengan TKSK, setiap ada survei PMKS kami juga ikut turun ke lapangan, ketika juga mau penyaluran kami juga ikut. Kemaren ada bantuan kursi roda untuk PMKS penyandang disabilitas pihak Kecamatan yang menjemput kursi rodanya ke Dinas Sosial Kabupaten sampai selesai penyalurannya...”

- b) Kemitraan dengan LSM/NGO: TKSK bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu-isu sosial tertentu, seperti pemberdayaan ekonomi, advokasi hak-hak anak, atau rehabilitasi penyandang disabilitas.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Resty selaku TKSK Banyuputih pada saat diwawancarai :¹¹⁵

“...kami telah koordinasi dengan berbagai pihak baik instansi, lembaga, pokmas, organisasi dll. Ini dilakukan untuk mempermudah kami jika membutuhkan sesuatu yang kami tidak bisa lakukan. Misalnya lembaga sosial minta carikan 50 orang untuk mau dibantu pemberian sembako, alat bantu untuk disabilitas dll. Data sudah ada, jadi enak bisa lebih cepat pelaksanaannya, itu fungsinya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain...”

- c) Kemitraan dengan Sektor Swasta: TKSK juga dapat menggandeng sektor swasta untuk mendukung PMKS melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sering kali mencakup pemberian bantuan langsung, pelatihan keterampilan, atau program beasiswa.

¹¹⁴ Ibu Ely diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

¹¹⁵ Ibu Resty diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

Dalam pelaksanaannya contoh kemitraan di Kabupaten Situbondo adalah:

- a) Program CSR Perusahaan: Misalnya, perusahaan di daerah Situbondo berkontribusi melalui program tanggung jawab sosialnya dengan memberikan bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi PMKS.
- b) Kemitraan dengan Puskesmas: TKSK bekerjasama dengan puskesmas setempat untuk memastikan PMKS mendapatkan layanan kesehatan yang layak, termasuk pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan yang dibutuhkan.



Gambar 4.10
Kerjasama dengan Sentra Mahatmiya¹¹⁶

¹¹⁶ Dinas Sosial Kab. Situbondo,
<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>,
diakses pada 20 Agustus 2024

4) Rujukan

Tindakan yang dilakukan oleh TKSK untuk menghubungkan PMKS dengan layanan atau lembaga yang lebih mampu menangani kebutuhan khusus yang tidak dapat diselesaikan oleh TKSK sendiri. Kedua konsep ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pendampingan sosial dan penanganan PMKS di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya contoh kemitraan dan rujukan di Kabupaten Situbondo:

a) Rujukan Kesehatan

Jika ada PMKS yang membutuhkan perawatan kesehatan khusus, seperti operasi atau pengobatan penyakit kronis, TKSK akan merujuknya ke rumah sakit atau puskesmas setempat yang memiliki fasilitas dan kemampuan untuk menangani masalah tersebut.

b) Rujukan Psikososial

PMKS yang mengalami trauma psikologis, seperti korban kekerasan atau bencana alam, dirujuk ke lembaga atau profesional yang menyediakan layanan konseling atau rehabilitasi psikososial.

c) Rujukan Pendidikan

Anak-anak PMKS yang putus sekolah sering dirujuk ke program pendidikan informal atau program beasiswa melalui

kemitraan TKSK dengan lembaga pendidikan setempat atau program pemerintah.

Menurut Mas Lutfi selaku TKSK Banyuglugur pada saat diwawancarai:¹¹⁷

“...proses rujukan pertama-tama mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi oleh PMKS. Jika masalah tersebut memerlukan intervensi yang lebih mendalam (misalnya, rehabilitasi medis atau bantuan hukum), maka TKSK akan melakukan rujukan. Kemudian menghubungi lembaga atau instansi yang memiliki kompetensi dalam menangani masalah tersebut, seperti rumah sakit, panti sosial, atau lembaga hukum. Pendampingan Selama proses rujukan TKSK memastikan bahwa PMKS benar-benar mendapatkan layanan yang dirujuk tersebut dan proses rujukan berjalan dengan lancar...”.



Gambar 4.11
Rujukan bersama puskesmas¹¹⁸

¹¹⁷ Mas Lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 5 September 2024

¹¹⁸ Dinas Sosial Kab. Situbondo,

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran fasilitasi melalui kemitraan dan rujukan adalah dua elemen kunci yang membantu TKSK dalam menangani PMKS di Kabupaten Situbondo secara lebih efektif dan komprehensif. Melalui kemitraan, TKSK dapat memanfaatkan berbagai sumber daya dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sementara itu, rujukan memungkinkan TKSK untuk menghubungkan PMKS dengan layanan yang lebih sesuai dan tepat guna, memastikan bahwa kebutuhan PMKS terpenuhi dengan baik. Kedua strategi ini sangat penting dalam menciptakan dukungan yang lebih kuat dan terintegrasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo.

c. Peran Administrasi

Peran dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Situbondo sangatlah penting dalam mendukung dan mengoordinasikan program-program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan layanan kesejahteraan lainnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan tanggung jawab yang mencakup koordinasi, pendataan, dan penyaluran bantuan, mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terlaksana secara

<https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>, diakses pada 20 Agustus 2024

efektif dan tepat sasaran. Selain itu, mereka juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta membantu dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada untuk kemudian mencari solusi yang efektif.

Bentuk peran administrasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah :

1) Pemetaan Sosial

Proses pengumpulan, analisis, dan visualisasi data terkait masalah kesejahteraan sosial yang ada di wilayah tertentu. Dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Situbondo, pemetaan sosial bertujuan untuk mengetahui secara rinci kondisi dan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ruji selaku TKSK

Sumbermalang pada saat diwawancarai:¹¹⁹

“...tujuan pemetaan sosial sendiri ya untuk mengidentifikasi orang yang tergolong PMKS, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar dan lain-lain, lalu untuk melihat masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat secara detail, misalnya tingkat kemiskinannya, akses pelayanannya, serta membantu TKSK merancang program yang tepat sesuai data yang diperoleh dari pemetaan sosial. Nah Pemetaan sosial ini juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi perubahan atau perkembangan dalam penanganan PMKS...”

Menurut Bapak Ruji selaku TKSK Sumbermalang pada

¹¹⁹ Bapak Ruji diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 18 September 2024

saat diwawancarai.¹²⁰

“...proses pemetaan sosial di ini diawali dengan mengumpulkan data mengenai PMKS dan masalah sosial yang mereka hadapi, dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah, wawancara, mengakses data dari desa, atau dinas yang lain, kayak data kemiskinan, tingkat pendidikan, atau layanan kesehatan. Nah kemudian dianalisis untuk identifikasi pola masalah sosial yang ada di wilayah itu, daerah mana saja yang punya konsentrasi PMKS tertinggi. Data yang sudah dianalisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta atau diagram biar mudah dipajami. Misalnya, TKSK membuat peta wilayah yang menunjukkan lokasi-lokasi dengan jumlah PMKS terbanyak atau peta yang menunjukkan akses terhadap layanan sosial. Nah yang terakhir hasil dari pemetaan sosial itu dilaporkan ke pihak terkait, yang kemudian menggunakan data ini sebagai dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan program yang akan dijalankan...”

Dalam pelaksanaannya, contoh pemetaan sosial dapat berupa:

- a) Pemetaan fakir miskin yang mana pemetaan sosial tersebut mengidentifikasi kecamatan dengan tingkat fakir miskin tertinggi, sehingga perlu program bantuan sosial berupa PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat disalurkan secara tepat di daerah tersebut.
- b) Pemetaan penyandang disabilitas yang mana pemetaan sosial tersebut mengidentifikasi kecamatan dengan tingkat penyandang disabilitas tertinggi, sehingga perlu program bantuan sosial berupa alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan dan di wilayah tersebut.

¹²⁰ Bapak Ruji diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 18 September 2024

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran administrasi melalui pemetaan sosial yang dilakukan oleh TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo adalah langkah penting untuk memastikan bahwa intervensi sosial tepat sasaran dan efektif. Melalui pemetaan, TKSK dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, merencanakan program yang lebih terarah, dan memantau hasil dari intervensi pelaksanaannya, pemetaan sosial tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan kabupaten.

2) Pencatatan

Proses dokumentasi sistematis mengenai data dan informasi terkait PMKS serta intervensi atau layanan yang diberikan kepada mereka. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi terkait PMKS dikelola dengan baik, sehingga memudahkan pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi program.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Vivin selaku TKSK Besuki pada saat diwawancarai:¹²¹

“...tujuan pencatatan untuk merekam informasi secara rinci tentang PMKS, termasuk jenis masalah sosial yang mereka hadapi, lokasi mereka, dan kebutuhan mereka. Nah ini membantu TKSK memantau perkembangan PMKS setelah mereka menerima layanan, serta mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan. Data yang dicatat oleh TKSK ini

¹²¹ Ibu Vivin diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 24 Agustus 2024

dek jadi bahan laporan kepada dinas sosial untuk memastikan adanya koordinasi dalam penanganan PMKS ini. Dengan mencatat data secara terstruktur ini, TKSK dapat lebih mudah merencanakan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan...”

Menurut Ibu Intan selaku TKSK Kecamatan Suboh pada saat diwawancarai:¹²²

“...proses pencatatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari kunjungan lapangan, survei, atau wawancara dengan PMKS. TKSK bisa melakukan pencatatan secara manual (buku catatan fisik) atau menggunakan sistem digital seperti mengisi pada web Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Kemudian data yang sudah dicatat disimpan dengan rapi agar pas dibutuhkan tinggal ngambil, baik nanti untuk pelaporan, monitoring, ataupun evaluasi...”

Jenis pencatatan yang dilakukan oleh TKSK adalah berupa pencatatan data PMKS yang berisi profil PMKS itu sendiri, jenis masalah kesejahteraannya serta riwayat bantuan yang telah diberikan. Selain itu mencatat program dan intervensi yang berupa jenis program yang dilaksanakan, data penerima manfaat, dan hasil intervensi. Kemudian pencatatan rujukan yang berupa catatan penerima rujukan, jenis rujukan, serta status tindak lanjut.

Menurut Ibu Intan selaku TKSK Kecamatan Suboh pada saat diwawancarai :¹²³

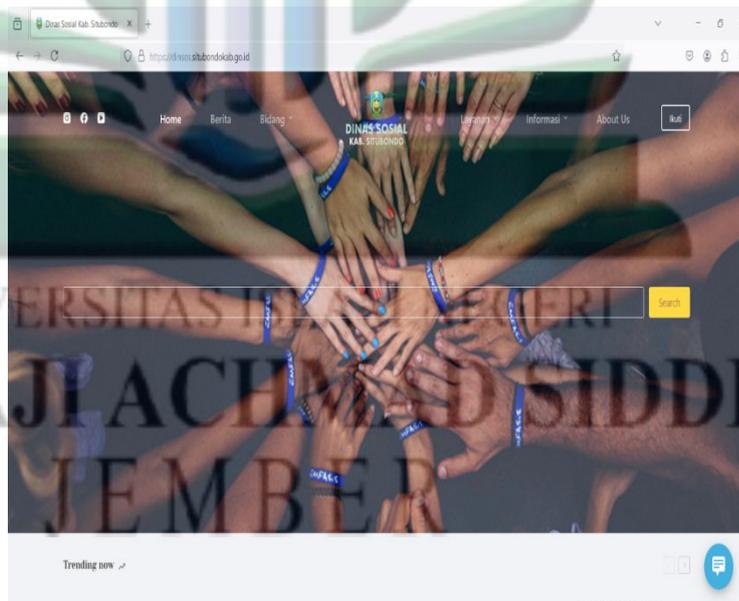
“...kalo proses identifikasi, kami minta datanya itu ke desa dek, jadi yang tau masyarakatnya itu ya desa tapi juga kami survey ke lokasi, tanya ke pak RT, ke tetangganya untuk memastikan benar nggak data identitas tersebut, sesuai nggak dengan keadaannya...”

¹²² Ibu Vivin diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 24 Agustus 2024

¹²³ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

Dalam pelaksanaannya contoh pencatatan yang dilakukan oleh TKSK dapat berupa:

- a) Pencatatan penerima program bantuan bagi fakir miskin seperti yang dicatat termasuk jumlah bantuan yang diterima dan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga setelah menerima bantuan.
- b) Pencatatan penerima alat bantu bagi penyandang disabilitas yang dicatat untuk memantau perkembangan kesehatan mereka setelah mendapat bantuan tersebut.



Gambar 4.12
Pendataan PMKS¹²⁴

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran administrasi melalui pencatatan oleh TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo adalah langkah penting untuk memastikan

¹²⁴ Dinas Sosial Kab. Situbondo, <https://dinsos.situbondokab.go.id/>, diakses pada 20 Agustus 2024

bahwa semua data terkait PMKS dan program intervensi terdokumentasi dengan baik. Pencatatan ini membantu dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta memastikan bahwa program penanganan masalah sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3) Pelaporan

Proses penyampaian data dan informasi mengenai kegiatan, intervensi, serta kondisi PMKS kepada pihak-pihak terkait, seperti dinas sosial, pemerintah daerah, atau instansi lain yang berkepentingan. Pelaporan ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab TKSK untuk memastikan bahwa penanganan masalah sosial di tingkat kecamatan terpantau dan terdokumentasi dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anshar selaku TKSK

Arjasa pada saat diwawancarai:¹²⁵

“...tujuan pelaporan ini untuk memantau penanganan PMKS tentang jumlah PMKS yang ada, jenis masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi, dan progres penanganan atau bantuan yang sudah diberikan. Membantu pemerintah dan dinas terkait dalam mengevaluasi program kesejahteraan sosial yang berjalan, sehingga dapat ditingkatkan atau disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan. Pelaporan menjadi sarana komunikasi antara TKSK dan berbagai instansi terkait untuk mendukung penanganan PMKS secara terpadu. Pelaporan yang terstruktur membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan TKSK terdokumentasi secara transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah...”

¹²⁵ Bapak Anshar diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 10 September 2024

Menurut Bapak Anshar selaku TKSK Asembagus pada saat diwawancarai:¹²⁶

“...proses pelaporan oleh TKSK dengan mengumpulkan data dilapangan melalui kunjungan ke rumah-rumah, survei, wawancara, serta dari hasil program atau intervensi yang dilakukan. Data ini kemudian diolah menjadi laporan yang terstruktur. Penyusunan laporan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh dinas sosial atau pemerintah daerah. Laporan ini bisa bulanan, triwulan, atau tahunan berdasarkan kebutuhan khusus, seperti pelaporan setelah pelaksanaan program. Laporan yang telah disusun disampaikan kepada dinas sosial, pemerintah kabupaten, atau instansi terkait lainnya. Penyampaian bisa dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik, atau melalui sistem digital jika ada platform yang disediakan oleh dinas sosial...”

Jenis pelaporan oleh TKSK berupa pelaporan data PMKS mengenai profil dan jumlah PMKS serta kondisi sosial dan ekonomi. Adapun pelaporan intervensi atau bantuan berupa jenis bantuan yang diberikan, jumlah penerima bantuan, serta status dan hasil intervensi. Pelaporan rujukan berupa data rujukan dan tindak lanjut rujukan. Sedangkan pelaporan program khusus berupa kegiatan fasilitasi dan pendampingan serta hasil program.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Badri selaku TKSK Kecamatan Asembagus pada saat diwawancarai :¹²⁷

“...TKSK harus mengisi pada aplikasi yang telah disediakan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang dilakukan, misalnya hari ini saya melakukan survei kepada calon penerima kursi roda dengan melihat keadaannya, meminta berkas adminduknya, menanyai penyakit yang

¹²⁶ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

¹²⁷ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

diderita beserta kronologi dan pertanyaan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini untuk menyesuaikan dengan prosedur yang ada, kemudian itu diusulkan dulu ...”

Dalam pelaksanaannya contoh pelaporan TKSK di Kabupaten Situbondo dapat berupa:

- a) Pelaporan program PKH untuk fakir miskin berupa pelaporan oleh TKSK terkait jumlah penerima Program Keluarga Harapan di kecamatan tertentu, jenis bantuan yang diterima, serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga.
- b) Pelaporan program bagi penyandang disabilitas berupa pelaporan oleh TKSK terkait jumlah penerima alat bantu di kecamatan tertentu, jenis bantuan yang diterima, serta dampaknya terhadap pemakaian alat tersebut.

Dari kenyataan tersebut bahwasanya peran administrasi melalui pelaporan oleh TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo merupakan komponen vital dalam memastikan keberhasilan program kesejahteraan sosial. Melalui pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu, TKSK dapat membantu pemerintah dan dinas sosial dalam memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan program penanganan PMKS. Meskipun terdapat beberapa tantangan, pelaporan yang baik akan sangat membantu dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

a. Faktor pendukung dalam melaksanakan pelayanan penanganan PMKS

1) Faktor Organisasi

Organisasi faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan. Karena dengan adanya organisasi, maka sudah ada struktur dan pembagian kerja sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan karena sudah ada ketentuan di awal.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Resty selaku TKSK Banyuputih:¹²⁸

“Selain itu secara organisasi dan prosedur layanan memang sudah ditentukan dari awal bahwa masing-masing bidang sudah memiliki pembagian kerja. Bidang Pemberdayaan Sosial lebih membina kelembagaannya, Bidang Rehabilitasi Sosial lebih menangani kasusnya, sedangkan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lebih melaksanakan penanganan fakir miskin.”.

Begitu juga dengan Ibu Intan selaku TKSK Besuki juga menerangkan:¹²⁹

“kalau di sini itu memang sudah jelas ya dari struktur keorganisasian bahwa dalam struktur itu kita ada di bagian rehabilitasi sosial ini menangani kasus-kasus PMKS ini.”

Bapak Badri selaku TKSK Asembagus juga menegaskan:¹³⁰

¹²⁸ Ibu Resty diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

¹²⁹ Ibu Intan diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 23 Juli 2024

¹³⁰ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

“Jadi untuk pembagian kerja disini itu sudah bagus, sudah terstruktur. Misal ada masalah anak terlantar, bidang rehabilitasi sosial sini lah yang bergerak menanganinya. Kalau anak tersebut membutuhkan jaminan kesehatan, maka bidang perlindungan dan jaminan sosial lah yang akan membantu memprosesnya. Jadi koordinasi dan saling berkesinambungan satu dengan yang lain”.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendeskripsikan bahwa secara organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sudah baik, sehingga ketika melakukan suatu pelayanan akan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misal saja ada pengajuan proposal terkait TKSK, maka akan diproses oleh bidang rehabilitasi sosial yang membina kelembagaannya, dan untuk penanganan kasusnya yang bergerak adalah TKSK, dan juga fokus kasusnya akan diproses oleh bidang rehabilitasi sosial

2) Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Memiliki tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam bidang kesejahteraan sosial dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas layanan. Dukungan sumber daya manusia terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diwujudkan melalui penyediaan tenaga ahli dan relawan yang dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus PMKS, sehingga memperkuat kapasitas TKSK di lapangan. Pengembangan dan pelatihan SDM yang berkualitas menjadi prioritas dalam mendukung TKSK, memungkinkan mereka

bekerja dengan lebih efektif dalam mengidentifikasi dan memberikan layanan kepada PMKS di wilayah mereka.

Sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang kesejahteraan sosial turut memberikan konsultasi dan bimbingan kepada TKSK, memastikan setiap intervensi yang dilakukan sesuai dengan standar dan kebutuhan PMKS. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian khusus, seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis, memberikan dukungan penting bagi TKSK dalam menangani kasus PMKS yang kompleks dan memerlukan penanganan lintas disiplin. Dengan dukungan SDM yang kompeten, TKSK dapat menjalankan peran mereka secara lebih optimal, menciptakan sinergi dalam tim yang solid untuk menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial secara efektif dan berkelanjutan di tingkat kecamatan.

Seperti yang dikatakan Mas Fiqih selaku TKSK Mlandingan pada saat diwawancarai :¹³¹

“...SDM itu faktor pendukung TKSK dalam menangani PMKS karena SDM dari TKSK nya sendiri diperlukan untuk memberikan inovasi atau terobosan untuk penanganan PMKS tersebut serta diperlukan juga SDM dari masyarakat sendiri yakni cerdas akan pentingnya mengetahui lingkungan....”

Begitu juga dengan Bapak Ruji selaku TKSK Sumbemalang menambahkan bahwa:¹³²

¹³¹ Mas Fiqih diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 16 Oktober 2024

¹³² Bapak Ruji diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 18 Oktober 2024

“...dalam penanganan PMKS itu tergantung dari TKSKnya. Kalau tksk nya cekatan sat set yaa yang akan ditanganai banyaak begitu juga sebsliknya

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Maka, kemampuan dan keterampilan berpengaruh baik pada banyaknya kasus PMKS yang ditangani.

b. Faktor Penghambat

Salah satu penyebab kurang maksimalnya suatu pelayanan karena ada beberapa faktor penghambatnya.

1) Sumber Daya Manusia

Seperti yang dijelaskan oleh Mas Lutfi selaku TKSK Banyuglugur.¹³³

“Di sini kita kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM pekerja sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo karena yang menangani sedikit. Hanya ada 1 TKSK, sedangkan jumlah yang ditangani terdapat 26 jenis PMKS.”

Bapak Badri selaku TKSK Asembagus menambahkan bahwa:¹³⁴

“Faktor penghambat yang menjadikan pelayanan kurang maksimal yaitu sumber daya manusia atau pekerja sosial yang menangani PMKS sedikit.”

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Maka, SDM TKSK jika kurang adanya rasa keesaadaran maka akan menghambat kinerja dari TKSK itu sendiri.

¹³³ Bapak Lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 5 September 2024

¹³⁴ Bapak Badri diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

2) Sarana Prasarana Untuk Pelayanan Yang Kurang Memadai

Banyak TKSK yang menghadapi kendala mobilitas karena tidak tersedianya sarana operasional dalam menangani PMKS. Hal ini menyulitkan mereka dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang menjadi tempat tinggal sebagian besar PMKS. Salah satunya adalah kendaraan operasional.

Seperti yang dijelaskan oleh Mas Lutfi selaku TKSK Banyuglugur:¹³⁵

“...kendaraan operasional menjadi hambatan utama dalam menjangkau PMKS, terutama di wilayah terpencil. kami sering menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum, yang meningkatkan beban kerja dan biaya operasional pribadi...”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Resty selaku TKSK Banyuputih:¹³⁶

“...rumah saya di timur baluran sedangkan kecamatan di barat baluran jadi lmayan cukup jauh. Dengan tidak adanya kendaraan operasional disini ketika ada tugas dan kendaraan saya dipakai oleh suami, disitu kadang saya naik angkutan kadang juga kalo tidak bisa saya hubungi teman saya dari kecamatan untuk menghandle kegiatan tersebut...”

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti mendeskripsikan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan suatu pelayanan kurang maksimal, seperti yang di jelaskan oleh Mas Lutfi bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana menyebabkan terhambatnya suatu pelayanan, karena jumlah yang

¹³⁵ Bapak lutfi diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 5 September 2024

¹³⁶ Ibu Resty diwawancarai oleh peneliti di Situbondo, 29 Juli 2024

harus ditangani banyak seperti masalah anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak disabilitas, sedangkan yang menangani sedikit. Jadi pelayanan tetap jalan meskipun kurang maksimal.

C. Pembahasan dan Temuan

Pada tahapan ini, peneliti mendapatkan data di lapangan dengan menggunakan 3 teknik, diantaranya ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah didapatkan di lapangan harus sesuai atau merujuk pada fokus penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan teori yang sudah peneliti paparkan di bab 2 pada kajian teori. Data tersebut mengenai tentang peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo.

1. Efektivitas Program TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan dengan hasil temuan dilapangan TKSK telah melaksanakan programnya untuk penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo. Program TKSK tersebut telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menangani PMKS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata di Kabupaten Situbondo. Adapun dalam teori yang dijelaskan oleh Budiani bahwa indikator untuk mengukur efektivitas program berupa: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Yang pertama, TKSK menjalankan program tersebut tepat sasaran

yang dibuktikan dengan data PMKS yang diberikan oleh desa kepada TKSK di verifikasi ulang langsung ke rumah seorang tersebut dan memastikan data tersebut benar dan sesuai dengan adminduk yang dimiliki. Hal tersebut juga diungkapkan oleh semua TKSK bahwasanya pendataan yang dilakukan sesuai sasaran yakni menysasar pada masyarakat PMKS. *Yang kedua*, sosialisasi program TKSK dibuktikan dengan sosialisasi dari TKSK lewat rumah ke rumah (*door to door*), juga melalui media komunikasi. Darisitulah masyarakat bisa memahami bagaimana cara mengakses layanan yang disediakan. Hal tersebut juga direspon oleh masyarakat yang mengetahui informasi seputar bantuan kepada PMKS melalui media komunikasi. *Yang ketiga*, TKSK menjalankan program tersebut mempunyai tujuan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan kemandirian PMKS yang dibuktikan dengan menjalankan peran-peran TKSK sesuai dengan masalah kesejahteraan yang dihadapi. *Yang keempat*, TKSK menjalankan pemantauan program yang dibuktikan dengan TKSK melakukan kunjungan kepada PMKS setelah mendapatkan program bantuan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sebagai mestinya.

Jadi, dari indikator tersebut telah menunjukkan bahwa TKSK telah menjalankan suatu program yang efektif sesuai dengan indikator-indikator menurut budiani yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program serta pemantauan program. Diantara indikator tersebut yang paling berdampak terhadap masyarakat PMKS yakni sosialisasi program

agar masyarakat mengerti jenis bantuan yang ada. Kemudian tujuan program tersebut yang mana diperuntukkan untuk menangani PMKS. Kemudian ketepatan sasaran dimana kadang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Serta pemantauan program setelah masyarakat mendapatkan bantuan.

2. Peran TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan dengan hasil temuan di lapangan, TKSK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan yang dilakukan oleh TKSK sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di kecamatan. TKSK memiliki beberapa peran untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di kecamatan. Adapun peran tersebut tertuang dalam Permensos RI nomor 28 tahun 2018 yang disebutkan bahwa peran TKSK yaitu: Peran Administrasi, Peran Fasilitasi, dan Peran Koordinasi.

Hasil temuan di lapangan, TKSK dalam melaksanakan penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berperan penting. *Yang pertama*, TKSK memiliki peran administrasi. Peran ini sangat dibutuhkan karena TKSK perlu data dan informasi yang valid dan dapat mempetakan daerah-daerah PMKS serta memiliki catatan juga dokumentasi yang terkait tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan supaya penanganan pada PMKS tepat sasaran.

Fakta dilapangan yang terjadi, TKSK perlu data dan informasi

yang valid dan dapat memetakan daerah-daerah PMKS supaya penanganan pada PMKS tepat sasaran yaitu ketika TKSK mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang PMKS, ia meminta data seseorang tersebut atau data PMKS ke pihak desa. Dari data yang didapatkan, TKSK dapat memetakan daerah-daerah PMKS yang kemudian perlu diverifikasi ulang kebenaran data tersebut yang didapatkan dari desa. TKSK turun langsung mengunjungi kediaman seseorang PMKS tersebut untuk meminta dan menunjukkan bukti adminduknya. Ketika data tersebut sudah benar dan sesuai antara data yang dari desa dengan data asli seorang tersebut, maka TKSK memvalidasi dan membuat laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Untuk proses administrasi ini sama perlakuannya antara PMKS fakir miskin dan PMKS penyandang disabilitas serta PMKS jenis lain juga.

Dalam hal ini, sudah jelas bahwa TKSK telah melaksanakan perannya dengan baik dengan memberikan pelayanan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui peran administrasi dalam bentuk pemetaan sosial, dan melakukan pencatatan serta laporan terkait dengan seorang PMKS yang perlu mendapatkan penanganan dari TKSK itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Permensos RI nomor 28 tahun 2018 pada pasal ... bahwa TKSK memiliki peran administrasi yaitu kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan, dan pelaporan yang menasar pada individu, kelompok,

maupun masyarakat PMKS.

Yang kedua, TKSK memiliki peran fasilitasi. Peran ini sangat dibutuhkan karena TKSK memiliki peran fasilitasi yang diberikan kepada PMKS berupa pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan rujukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien di tingkat kecamatan serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hasil temuan di lapangan, TKSK melakukan pendampingan sosial kepada PMKS supaya mendapatkan perlindungan dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima PMKS dengan lancar dan tanpa ada masalah. Jadi, ketika ada permasalahan terkait dengan bantuan yang tidak dapat diberikan atau tidak dapat dicairkan, disitulah TKSK yang membantu penanganannya sampai PMKS benar-benar dapat menerima bantuannya baik PMKS fakir miskin maupun PMKS penyandang disabilitas atau jenis PMKS yang lain. Tidak hanya itu TKSK juga melakukan bimbingan kepada PMKS, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan kasus permasalahan PMKS itu sendiri. Jadi, semisal yang dibutuhkan pendidikan, TKSK dapat memberikan bimbingan berupa pengajaran secara langsung ataupun rujukan kepada sekolah-sekolah. TKSK juga melakukan kemitraan guna memperluas jangkauan layanan sosial dan memastikan bahwa PMKS mendapatkan akses terhadap sumber daya dan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta TKSK juga

melakukan rujukan untuk menghubungkan PMKS dengan layanan atau lembaga yang lebih mampu dan bersifat khusus yang tidak dapat diselesaikan oleh TKSK sendiri.

Dalam hal ini, sudah jelas bahwa TKSK telah melaksanakan perannya dengan baik dengan memberikan pelayanan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui peran fasilitasi dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan rujukan kepada PMKS yang perlu mendapatkan penanganan dari TKSK. Hal ini sesuai dengan Permensos RI nomor 28 tahun 2018 pada pasal ... bahwa TKSK memiliki peran fasilitasi yang diberikan kepada PMKS berupa pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan rujukan yang menasar pada individu, kelompok, maupun masyarakat PMKS.

Yang ketiga, TKSK memiliki peran koordinasi. Peran ini sangat dibutuhkan karena TKSK memiliki peran koordinasi yang diberikan kepada PMKS berupa saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan sinergitas, dan keserasian program di tingkat kecamatan serta mewujudkan terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien.

Hasil temuan dilapangan, TKSK telah melakukan koordinasi dengan pihak lain, baik dari instansi, lembaga, komunitas, ataupun masyarakat supaya antar pihak dapat bersinergi dengan baik serta

menyamakan sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dari koordinasi tersebut TKSK mendapat banyak informasi serta bantuan dari pihak lain kepada PMKS untuk mendapat kesejahteraan. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa TKSK telah melaksanakan perannya dengan baik dengan memberikan pelayanan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi sehingga dari koordiansi tersebut dapat membantu TKSK serta PMKS itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Permensos RI nomor 28 tahun 2018 pada pasal ... bahwa TKSK memiliki peran koordinasi yaitu kegiatan berupa saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menysasar pada individu, kelompok, maupun masyarakat PMKS itu sendiri.

Di Kabupaten Situbondo, keberadaan TKSK memainkan peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dialami PMKS. TKSK berfungsi sebagai agen yang menjembatani layanan sosial pemerintah dengan masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian dan intervensi sosial. TKSK juga aktif dalam pemetaan masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, disabilitas, dan lain-lain. Jadi beberapa peran yang dilakukan oleh TKSK sesuai dengan teori peran Soejono Soekamto yaitu seseorang yang memiliki jabatan memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Diantara peran TKSK yang paling berdampak terhadap masyarakat PMKS yakni peran fasilitasi dimana

peran ini langsung berhubungan dengan masyarakat serta melibatkan masyarakat langsung dalam kegiatannya. Kemudian peran administrasi, tanpa adanya peran administrasi TKSK mungkin juga tidak mengetahui seseorang yang benar-benar tergolong dalam PMKS. Serta peran koordinasi, karena tanpa koordinasi kegiatan akan lambat dalam pelaksanaannya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat TKSK Dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo

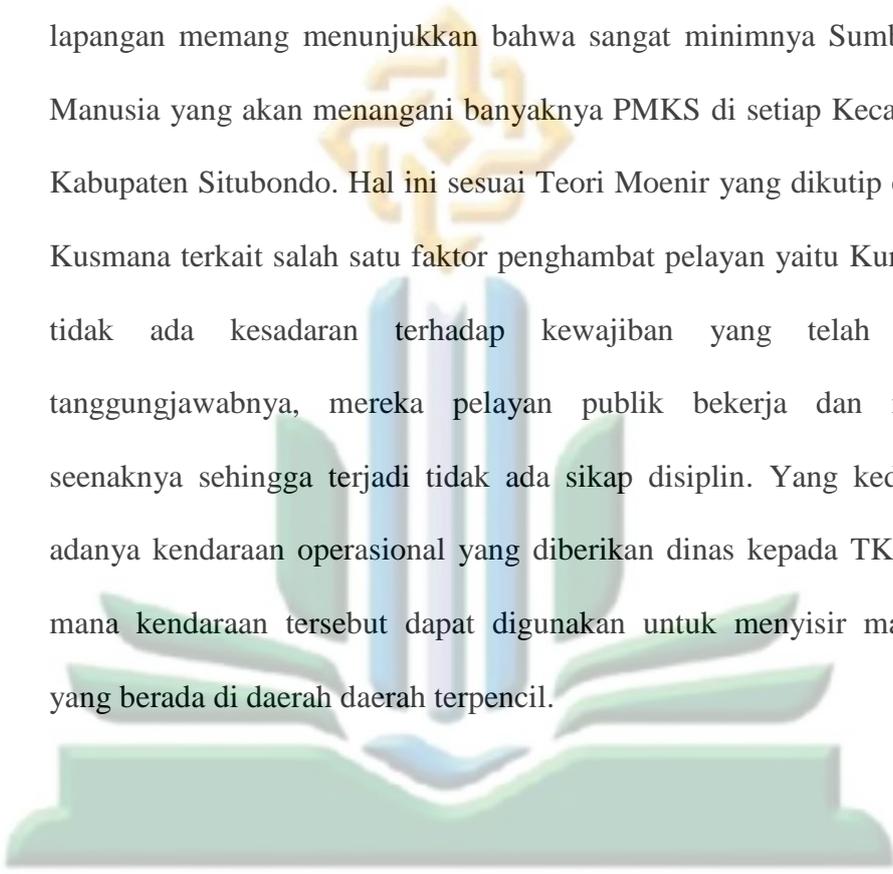
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, TKSK dalam melaksanakan pendampingan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendukung merupakan faktor yang menjadikan pendampingan menjadi efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor pendukung yang terjadi dilapangan dalam penanganan PMKS yaitu yang Pertama, karena ada faktor organisasi. Berdasarkan observasi peneliti, di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan juga di Dinas Sosial Kabupaten Situbondoo sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Hasil temuan di lapangan, TKSK menjalankan fungsinya ketika ada laporan masuk terkait masalah sosial terutama masalah fakir miskin dan penyandang disabilitas. Jadi, ketika ada laporan dari masyarakat atau desa tentang fakir miskin dan penyandang disabilitas, maka hal itu sudah menjadi tanggungjawab TKSK di bidang rehabilitasi untuk segera

memproses masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Moenir yang dikutip oleh Ana Kusmana bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelayanan yaitu faktor organisasi yaitu meliputi sistem, pembagian kerja, mekanisme kerja, prosedur pelayanan, dan metode yang digunakan.

Kedua, faktor kemampuan. Dengan adanya kemampuan pekerja sosial di bidangnya, maka konsep dalam penanganan PMKS lebih efektif karena sebelumnya pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memiliki relasi yang banyak. Jadi tingkat kemampuan yang dimiliki oleh TKSK sudah tersertifikasi akan lebih terkonsep dan jaringannya lebih luas lagi sehingga akan memudahkan penanganan dan pendampingan. Hasil temuan di lapangan berdasarkan observasi peneliti. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bidang Rehabilitasi memiliki 1 TKSK di setiap Kecamatan. Hal ini sesuai dengan teori Moenir yang dikutip oleh Ana Kusmana bahwa salah satu faktor pendukung sebuah pelayanan adalah faktor kemampuan dan keterampilan, yaitu mampu membuat konsep yang sesuai dengan keinginan klien.

Selain adanya faktor pendukung, tentunya ada faktor penghambat yang menyebabkan pelayanan kurang maksimal. Yang pertama karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sehingga kurang maksimal. Yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menjangkau pmks yang di daerah terpencil. Masalah yang dilaporkan sangat banyak khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas tetapi tenaga pelayanan kurang sehingga proses

pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Hasil temuan di lapangan memang menunjukkan bahwa sangat minimnya Sumber Daya Manusia yang akan menangani banyaknya PMKS di setiap Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Hal ini sesuai Teori Moenir yang dikutip oleh Ana Kusmana terkait salah satu faktor penghambat pelayan yaitu Kurang atau tidak ada kesadaran terhadap kewajiban yang telah menjadi tanggungjawabnya, mereka pelayan publik bekerja dan melayani seandainya sehingga terjadi tidak ada sikap disiplin. Yang kedua tidak adanya kendaraan operasional yang diberikan dinas kepada TKSK yang mana kendaraan tersebut dapat digunakan untuk menyisir masyarakat yang berada di daerah daerah terpencil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada penelitian ini merupakan jawaban dari fokus penelitian

1. Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo dimana yang menjadi acuan program tersebut efektif diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program.
2. Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo yaitu pertama, sebagai administrator berupa pemetaan sosial, melakukan pencatatan, serta melakukan pelaporan. Kedua, sebagai koordinator berupa melakukan koordinasi, saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, serta membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketiga, sebagai fasilitator berupa pendampingan sosial, melakukan bimbingan sosial, melakukan kemitraan, serta melakukan rujukan.
3. Faktor pendukung dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo berupa organisasi dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo berupa kurangnya tenaga kesejahteraan dan kurangnya sarana prasarana.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, peneliti menyadari bahwa kurangnya pemilihan subyek penelitian pada bagian PMKS menjadi keterbatasan peneliti, sehingga hasil dari penelitian ini belum cukup sempurna.
2. Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), terus mengembangkan program serta pelayanan kesejahteraan sosial pada PMKS agar mendapatkan dampak baik dari adanya penanganan PMKS yang dilakukan TKSK di Kabupaten Situbondo dapat semakin membawa kebermanfaatan.
3. Bagi masyarakat, terus memberikan dukungan kepada TKSK untuk dapat terus melakukan kebermanfaatan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan bagi PMKS di Kabupaten Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Agus, Tulus. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama Ridwan.
- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Biddle, B. J., dan Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik RI. (2010). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fokus Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. (2023). Profil Dinas Sosial. Diakses dari <https://www.instagram.com/dinsoskabsitubondo/profilecard/?igsh=MWwyd3pxa2YzY3Z2cw==>, 10 Januari 2023.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., et al. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ife, Jim. (1997). *Community Development: Creating Community Alternatives—Vision, Analisis, and Practice*. London: Longman.
- Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2013). *Panduan TKSK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2011). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia 2011*. Vol. 12. Riau: PPID dan Media Center Dinsos.

Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2023). *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta.

Kusmana, Ana. (2018). "Pelayanan Prima pada Kantor Pemerintahan Adalah Keniscayaan." Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kusmana, Ana. (2018). Pelayanan Prima pada Kantor Pemerintahan Adalah Keniscayaan. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/makale/id/data-publikasi/berita-terbaru/2814-pelayanan-prima-pada-kantor-pemerintahan-adalah=keniscayaan.html>, 24 Juni 2018.

Laela Safitri (2023). "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo".

Maryani, Dedeh & Roselin, Ruth. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama.

Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mursalat, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi.

Nasobi, Suma Niki & Khoirotun, Saniyah. (2023). Peran Gapoktan dalam Memberdayakan Eksistensi Petani Kopi Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 123-135.

Ni Wayan Budiani. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 45-60.

Nia Andasari (2022). "Strategi Dakwah Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (Lpks Abh) Anak Bangsa Kabupaten Rejang Lebong)".

Nurdin, Amin, dan Ahmad Abrori. (2006). *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Pemerintah Kab. Situbondo (2023). *PENDATAAN PMKS 2023 Dinas Sosial Kabupaten Situbondo*.

Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

- Permensos RI. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
- Rizki, S. A. (2024). *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak*. Pasuruan.
- Saeful, Achmad & Ramdhayanti, Sri. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam. *Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE*, 3(1), 1-17. Diakses dari <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.
- Sarah Cook dan Steve Macaulay, "Perfect Empowerment" (1996)
- Septiani Putri Winata, (2016). "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar".
- Sherly Marlina (2021). "Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru".
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Soerjono Suekamto, (2009) *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, Moh. Prabu. (2005). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019
- Vivi Lestari 2021 "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda".

Wisnu Andrianto, M. Saleh Soeaidy & Stefanus Pani Rengu. (2014). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 56-72.

Yefni (2021) "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid- 19".

Yoce Divelino, S.Kom., M.CIO. (2017). Buku Data PMKS Dan PSKS Sumatera Barat Tahun 2019. Padang, Sumatera Barat. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Yunus, Eko Yudianto. (2021). "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo."

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daru Kutni
 NIM : 201103020015
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Jember, 10 November 2024
 Saya yang menyatakan
JEMBER



Muhammad Daru Kutni
 201103020015

LAMPIRAN LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo	Peran	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian peran Jenis-jenis peran Aspek-aspek peran 	Menurut Soejono Soekamto	<ol style="list-style-type: none"> Narasumber Penelitian : Dinas Sosial (Data Jumlah PMKS), Koordinator TKSK Kab. Situbondo Literatur yang berkaitan dengan penelitian : Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel dan lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis data <ol style="list-style-type: none"> Reduksi data Penyajian data Penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo? Bagaimana peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo? Apa saja faktor pendukung dan penghambat TKSK

						dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo?
	Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemberdayaan masyarakat 2. Prinsip pemberdayaan 	Menurut Jim Ife, Najiyati			
	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian efeektivitas 2. Indikator efektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut KBBI 2. Menurut Budiani 			
	Pekerjaan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pekerjaan sosial 2. Praktek pekerjaan sosial 	UU RI nomor 14 Tahun 2019			
	TKSK	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengertian TKSK 4. Tujuan TKSK 5. Tugas TKSK 6. Peran TKSK 	Permensos RI nomor 28 Tahun 2018			
	PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian PMKS 2. Jenis PMKS 	Permensos RI nomor 8 Tahun 2012			

DATA PMKS KAB. SITUBONDO TAHUN 2023

No	Kecamatan	PMKS Fakir Miskin	PMKS Penyandang Disabilitas
1	Banyuglugur	75	158
2	Besuki	39	155
3	Suboh	276	143
4	Sumbermalang	677	101
5	Jatibanteng	249	92
6	Mlandingan	321	85
7	Bungatan	70	9
8	Kendit	12	140
9	Panarukan	222	134
10	Situbondo	15	130
11	Panji	246	121
12	Mangaran	250	177
13	Kapongan	136	126
14	Arjasa	523	-
15	Jangkar	25	62
16	Asembagus	221	230
17	Banyuputih	682	108



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Muhammad Daru Kutni

Narasumber : TKSK

Fokus penelitian	Daftar pertanyaan
1. Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja program dari TKSK dalam penanganan PMKS? 2. Siapakah yang menjadi sasaran dalam program tersebut? 3. Bagaimana TKSK mensosialisasikan programnya kepada masyarakat PMKS? 4. Apa yang menjadi tujuan pada program tersebut? 5. Bagaimana program tersebut dilaksanakan supaya tepat sasaran? 6. Bagaimana TKSK memantau kegiatan atau program yang diberikan kepada PMKS? 7. Apakah dari semua program yang dilaksanakan itu dapat dikatakan efektif?
1. Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja peran yang dilakukan TKSK dalam penanganan PMKS? 2. Apa saja bentuk-bentuk peran yang dilakukan TKSK? 3. Apa yang menjadi tujuan pada peran tersebut? 4. Bagaimana proses pelaksanaan pada peran tersebut? 5. Bagaimana contoh penerapan jika terjadi pada PMKS fakir miskin? 6. Bagaimana contoh penerapan jika terjadi pada PMKS penyandang disabilitas? 7. Apakah semua peran yang dilakukan TKSK tersebut dapat meningkatkan kualitas dan mampu menangani PMKS?
2. Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung TKSK dalam penanganan PMKS ini? 2. Mengapa hal tersebut bisa

	<p>dikatakan sebagai faktor pendukung TKSK?</p> <ol style="list-style-type: none">3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat TKSK dalam penanganan PMKS ini?4. Mengapa hal tersebut dikatakan sebagai faktor penghambat TKSK?
--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peneliti : Muhammad Daru Kutni

Narasumber : Pegawai Kecamatan Bagian Sosial

Fokus penelitian	Daftar pertanyaan
1. Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana bapak/ibu melihat kinerja TKSK?2. Menurut bapak/ibu, apakah program yang dijalankan TKSK efektif menangani PMKS di kecamatan ini?3. Apakah ada program dari pemerintah kecamatan yang berkesinambungan dengan TKSK terkait penanganan PMKS?4. Apakah ada dari pihak kecamatan yang ikut mensosialisasikan program dari TKSK?
2. Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan peran dari TKSK?2. Apakah TKSK telah menjalankan perannya?3. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh TKSK?
3. Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pernah TKSK koordinasi dengan pihak kecamatan?2. Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan?3. Apakah pihak kecamatan pernah ikut serta terlibat dalam program kegiatan TKSK?4. Kegiatan apa yang bapak/ibu ikuti?

Peneliti : Muhammad Daru Kutni

Narasumber : Masyarakat PMKS Fakir Miskin

Fokus penelitian	Daftar pertanyaan
1. Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Penyakit/disabilitas apa yang bapak/ibu alami sekarang?2. Sudah berapa lama bapak/ibu mengalami penyakit/disabilitas tersebut?3. Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan dari TKSK atau usulan dari TKSK?4. Bantuan apa saja yang pernah bapak/ibu terima?5. Sejak kapan bapak/ibu menerima bantuan tersebut?6. Apakah bantuan yang bapak/ibu terima digunakan sebagaimana mestinya?7. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya bantuan tersebut?
2. Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja bentuk bantuan dari TKSK kepada bapak/ibu?2. Apakah bapak/ibu hanya dibantu oleh TKSK atau juga dibantu oleh pihak lain?3. Apakah TKSK memberi bantuan melulu berupa uang tunai/sembako?4. Apakah pernah mengalami masalah ketika mengambil bantuan?5. Bagaimana langkah TKSK ketika bapak/ibu mengalami masalah sehingga bantuan tidak dapat dicairkan?6. Apakah bapak/ibu di data oleh TKSK pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan?
3. Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu dalam melakukan proses bantuan?2. Apa saja kendala yang pernah bapak/ibu alami ketika mendapatkan bantuan?

	3. Bagaimana penanganan TKSK ketika bapak/ibu mengalami permasalahan?
--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peneliti : Muhammad Daru Kutni
 Narasumber : Masyarakat PMKS Penyandang Disabilitas

Fokus penelitian	Daftar pertanyaan
1. Efektivitas program TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit/disabilitas apa yang bapak/ibu alami sekarang? 2. Sudah berapa lama bapak/ibu mengalami penyakit/disabilitas tersebut? 3. Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan dari TKSK atau usulan dari TKSK? 4. Bantuan apa saja yang pernah bapak/ibu terima? 5. Sejak kapan bapak/ibu menerima bantuan tersebut? 6. Apakah bantuan yang bapak/ibu terima digunakan sebagaimana mestinya? 7. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya bantuan tersebut?
2. Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja bentuk bantuan dari TKSK kepada bapak/ibu? 2. Apakah bapak/ibu hanya dibantu oleh TKSK atau juga dibantu oleh pihak lain? 3. Apakah TKSK memberi bantuan melulu berupa uang tunai/sembako? 4. Apakah pernah mengalami masalah ketika mengambil bantuan? 5. Bagaimana langkah TKSK ketika bapak/ibu mengalami masalah sehingga bantuan tidak dapat dicairkan? 6. Apakah bapak/ibu di data oleh TKSK pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan?
3. Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanganan PMKS di Kab. Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu dalam melakukan proses bantuan? 2. Apa saja kendala yang pernah bapak/ibu alami ketika mendapatkan bantuan?

	3. Bagaimana penanganan TKSK ketika bapak/ibu mengalami permasalahan?
--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pedoman Observasi

No	Aspek Observasi	Hasil yang dituju
1.	Tujuan	Untuk mendapatkan gambaran terkait TKSK, PMKS, serta lembaga terkait dalam penanganan PMKS di Kabupaten Situbondo
2.	Objek Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengamatan pada TKSK di setiap kecamatan sesuai dengan yang diteliti secara langsung.2. Mencari informasi serta melakukan pengamatan terkait TKSK, PMKS, dan .3. Melakukan pengamatan terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan kepada PMKS khususnya PMKS fakir miskin dan penyandang disabilitas.4. Mencari informasi dan mengamati permasalahan yang terjadi serta mendapatkan data dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada PMKS oleh TKSK.
3.	Waktu	2 bulan (menyesuaikan kondisi di lapangan).
4.	Lokasi	Dinas Sosial Kab. Situbondo, Kecamatan Banyuputih, Asembagus, Arjasa, Mangaran, Mlandingan, Suboh, Besuki, Sumbermalang, dan Banyuglugur.
5.	Alat observasi	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis2. Kamera

Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang didokumentasikan
1.	Dokumen data PMKS tahun 2023
2.	Dokumen struktur Dinas Sosial Kab. Situbondo
3.	Dokumentasi visi dan misi Dinas Sosial Kab. Situbondo
4.	Surat ijin dari Dinas Sosial Kab. Situbondo
5.	Dokumentasi foto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
di Kabupaten Situbondo

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Informan	Check List
1.	29-07-2024	Wawancara kepada TKSK Banyuputih	Ibu Resty	✓
2.	29-07-2024	Wawancara kepada TKSK Asembagus	Bapak Badri	✓
3.	10-09-2024	Wawancara kepada TKSK Arjasa	Bapak Anshar	✓
4.	13-08-2024	Wawancara kepada TKSK Mangaran	Ibu Lila	✓
5.	16-10-2024	Wawancara kepada TKSK Mlandingan	Mas Fiqih	✓
6.	23-07-2024	Wawancara kepada TKSK Suboh	Ibu Intan	✓
7.	24-08-2024	Wawancara kepada TKSK Besuki	Ibu Vivin	✓
8.	18-09-2024	Wawancara kepada TKSK Sumbermalang	Ibu Dita	✓
9.	05-09-2024	Wawancara kepada TKSK Banyuglugur	Mas Lutfi	✓
10.	30-08-2024	Wawancara kepada Pihak Kecamatan	Ibu Eva	✓
11.	16-07-2024	Wawancara kepada Pihak Dinas Sosial Kab. Situbondo	Ibu Fifin	✓
12.	29-07-2024	Wawancara kepada PMKS Fakir Miskin	Ibu Norsia	✓
13.	26-08-2024	Wawancara kepada PMKS Penyandang Disabilitas	Ibu Satina	✓

Situbondo, 09 November 2024

An. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretaris

RINA WIDHARNARINI, S.KM.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19701019 199403 2 001

DOKUMENTASI

NO	NAMA KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Wawancara kepada TKSK Banyuputih (Ibu Resty)	
2	Wawancara kepada TKSK Mlandingan (Mas Fiqih)	
3	Wawancara kepada TKSK Suboh (Ibu Intan)	

<p>4</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Asembagus, Pihak Kecamatan Asembagus dan Masyarakat PMKS Penyandang Disabilitas (Bapak Badri - Ibu Eli Kasi Kesra – Mbah Maimona)</p>	
<p>5</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Besuki (Ibu Vivin)</p>	
<p>6</p>	<p>Wawancara kepada Pihak Kecamatan (Ibu Farhana)</p>	

<p>7</p>	<p>Wawancara kepada Pihak Kecamatan bagian Kasi Sosial (Ibu Eva)</p>	
<p>8</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Sumbermalang (Ibu Dita)</p>	
<p>9</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Arjasa (Bapak Anshar)</p>	

<p>10</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Mangaran (Ibu Lila)</p>	
<p>11</p>	<p>Wawancara kepada TKSK Banyuglugur (Bapak Lutfi)</p>	
<p>12</p>	<p>Wawancara kepada Masyarakat PMKS Fakir Miskin (Mbah Norsia)</p>	

13 Wawancara kepada Masyarakat PMKS Penyandang Disabilitas (Mbah Satina)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://dakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.1375/Un.22/6.a/PP.00.9/ S /2024 7 Mei 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Daru Kutni
NIM : 201103020015
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia Terlantar di Kabupaten Situbondo"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



CS Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 13 Mei 2024

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Situbondo

di -

SITUBONDO

Nomor : 000.9.2/172/431.406.3.2/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : UIN KH Achmad Siddiq Jember
Nomor : B.1375/Un.22/6.a/PP.00.9/5/2024
Tanggal : 07 Mei 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD DARU KUTNI
Alamat/No HP : Kp. Krajan RT/RW 02/01 Desa Pesisir, Kec. Besuki, Kab. Situbondo / 081358745828
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : UIN KH Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- Judul : Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia Terlantar
- Tujuan : Penyusunan Skripsi
- Bidang : Dakwah
- Penanggung Jawab : Nasobi Niki Suma, S.Pd., M.Sc.
- Anggota/Peserta : 0
- Waktu : 13 Mei 2024 sampai dengan 07 Juni 2024
- Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**



Standar digital secara elektronik oleh
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Situbondo

BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- UIN KH Achmad Siddiq Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS SOSIAL**

Jl. Angrek No.54, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telp. (0338) 4591657
Pos-el dinsoskabsit@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 9625 / 431.305.1 / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RINA WIDHARNARINI S.KM.M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
Alamat : Jl. Angrek No. 54 Situbondo

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD DARU KUTNI**
NIM : 201103020015
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX

Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Situbondo*".

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 09 Desember 2024

An. **KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO**
Sekretaris



RINA WIDHARNARINI, S.KM.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19701019 199403 2 001

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Daru Kutni
Tempat / Tanggal Lahir : Situbondo, 18 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Krajan RT 002, RW 001
Desa Pesisir, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
No. Hp / Whatsapp : 081358745828
Email : muhammaddarukutni18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : TK Al – Ishlah Kec. Besuki, Kab. Situbondo
2. SD/MI : SDN 8 Besuki, Kab. Situbondo
3. SMP/MTS : SMPN 1 Banyuglugur, Kab. Situbondo
4. SMA/SMK/MA : SMAN 1 Besuki, Kab. Situbondo
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember